

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG PERBEDAAN HARGA SEWA LAPAK
(Study di Pasar Unyil Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang
Kabupaten Tulang Bawang Barat)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh
Ade Mareta Handayani
NPM. 1521030003

Program Studi: Mu'amalah

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2019 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG PERBEDAAN HARGA SEWA LAPAK
(Study di Pasar Unyil Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang
KabupatenTulang Bawang Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

Ade Mareta Handayani
NPM. 1521030003

Program Studi:Mu'amalah

Pembimbing I :Prof. Dr.H.Moh,Mukri, M.Ag.

PembimbingII :Hj. Linda Firdawaty,S.Ag.,M.H.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M

ABSTRAK

Salah satu kegiatan mua'malah adalah sewa-menyewa. Sewa-menyewa merupakan sesuatu yang lazim dilakukan masyarakat. Seperti halnya sewa-menyewa lapak Desa Gunung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam sewa – menyewa tentu ada penentuan harga, penentuan harga suatu transaksi seharusnya memenuhi unsur keadilan dan berlaku secara umum. Namun kenyataannya dalam transaksi sewa menyewa terdapat perbedaan dalam penentuan harga lapak pasar. Harga tersebut dilihat dari domisili atau tempat tinggal penyewa.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan harga sewa lapak pasar Unyil di Desa Gunung Agung, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga sewa Lapak Pasar di Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif - integratif (penelitian pada lapangan juga teori-teori pustaka) dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga lapak pasar Unyil, terdapat perbedaan harga berdasarkan domisili atau tempat tinggal pihak penyewa. Perbedaan harga tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat asli desa yang menyewa lapak. Harga sewa lapak lebih tinggi ditetapkan bagi penduduk luar Desa Gunung Agung, di mana latar belakang dari perbedaan harga tersebut yaitu Pasar tersebut dibangun di tanah ulayat desa, dan dibangun oleh swadaya masyarakat Desa, untuk kemaslahatan masyarakat desa, untuk peruntungan desa, untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Gunung salah satunya pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat. Maka diperlukan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian.

Kemudian apabila dianalisis berdasarkan hukum Islam, penetapan harga sewa dilakukan untuk kepentingan masyarakatnya, dalam hal ini agar tercipta keadilan bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Gunung Agung. Hal ini telah memenuhi syarat penetapan harga oleh hukum Islam yang bersifat adil. Sehingga penetapan harga sewa lapak pasar di Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat hukumnya diperbolehkan (*Mubah*).



**KEMENTERIAAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531 78042

PERSETUJUAN

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PERBEDAAN HARGA SEWA LAPAK (Studi
Pasar Unyil Desa Gunung Agung Kecamatan
Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang
Barat)**
Nama : **ADE MARETA HANDAYANI**
NPM : **1521030003**
Jurusan : **Muamalah**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.H.Moh.Mukri,M.Ag.
NIP. 195904161987031002.

Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H.
NIP. 197112041997032001.

**Mengetahui,
Ketua Prodi Muamalah**

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121062




**KEMENTERIAAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531 78042

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN HARGA SEWA LAPAK (Study Pasar Unyil Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat)"** disusun oleh: **ADE MARETA HANDAYANI, NPM : 1521030003, Jurusan Muamalah, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : Selasa, 18 Juni 2019, Waktu : 13.30 – 15.30, Tempat : Ruang Sidang II Fakultas Syariah.**

TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. 

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. 

Penguji I : Dr.Hj.Nurnazli, S.H., S.Ag.,M.H. 

Penguji II : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. 



**MENGETAHUI,
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Nurnazli, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002**

MOTTO

دُوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا مَرُّ أُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَٰلِكَ إِلَّا خِرَ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَر

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulilamri di antarakamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisaa’ 59).



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya.

Sebuah karya sederhana dengan bangga penulis mempersembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Adenan Ling dan Ibunda tercinta Evi Hayati, yang telah mendoakan, serta memotivasi.
2. Saudara-saudara yang tercinta kakakku Ade Vidiанти, Ade Fibriansyah, Adikku Ade Arritsa Viola, Ade Hani Fishesa, dan Bibiku Cik Yanti, Cik Bainah AF., ataskasih sayangnya.
3. Teman-teman seperjuangan Muamalah B 2015 UIN Raden Intan Lampung, Dila, Anisa Rahmawati, Nurul Amalia, Wiwit, Bendry, Agil, Agung, seluruh teman kelas muamalah B yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
4. M. Assegaf Aznan Siregar yang telah support serta doa yang selalu ditujukan kepadaku.
5. Sahabat seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Aznan Siregar Agus Sofiandi, Felia, Beby, Witri, Eka, Intan, Agis, Zam-zam, M. Ilham, Bang Ilham, Dandy.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Ade Mareta Handayani, dilahirkan pada tanggal 24 Maret 1997 di Kotabumi, anak ketiga dari pasangan Adenan Ling dan Evi Hayati. Adapun riwayat pendidikan yang pernah ditempuh adalah sebagai berikut:

1. PAUD TK Dharma Wanita Kotabumi, selesai pada tahun 2003.
2. SD Negeri 04 Gapura Kotabumi, selesai pada tahun 2009.
3. SMP Negeri 12 Kotabumi, selesai pada tahun 2012.
4. SMA Negeri 04 Kotabumi, selesai pada tahun 2015.
5. Melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1), di Universitas Islam Negeri Lampung dan mengambil Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah.

Selama menjadi siswa dan mahasiswa pernah mengikuti dan bergabung pada organisasi OSIS, Olahraga Basket, Pramuka, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Bandar Lampung, 2019

Ade Mareta Handayani
1521030003

KATA PENGANTAR

PujiSyukurkehadirat Allah SWT yang telahmelimpahkanrahmat, taufiksertahidayah-Nya, sehinggaskripsidenganjudul “TinjauanHukum Islam tentangSistemSewaMenyewaLapak (Study PasarDesaGunungAgungKecamatanGunungTerangKabupatenTulangBawang Barat)” dapatdiselesaikandenganbaikdantepatpadawaktunya. ShalawatsertasalamsayasampaikankepadaNabi Muhammad SAW, keluarga, parasahabatdanjugakepadaparapengikutnyahinggaakhirzaman. SkripsiiniditulisdandiselesaikansebagaisalahsatusyaratuntukmemperolehgelarSarjanaHukum (S.H) pada program StudiMuamalah (HukumEkonomiSyari’ah) di FakultasSyari’ahUniversitas Islam NegeriRadenIntan Lampung.

Sayamenyadarisepenuhnyabahwapenulisanskripsiinitidaklepasdaribantuan, bimbibingan, motivasi, saran dankritik yang telahdiberikanolehsemuapihak.Untukitudalamkesempataninipenulisanmengucapk anterimakasihkepada:

1. Dr.Alamsyah, S.Ag.,selakuDekanFakultasSyari’ah UIN RadenIntan Lampung.
2. Dr. H. Khairudin, M.H., selakuWakilDekan I FakultasSyari’ah UIN RadenIntan Lampung.
3. Drs.H.Haryanto, H, M.H., selakuWakilDekan II FakultasSyari’ah UIN RadenIntan Lampung.

4. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., dan Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Sekretaris Jurusan Fakultas Syari'ah.
6. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Aparatur Desa Gunung Agung dan masyarakat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya program Studi Muamalah, atas ilmunya dan didikan yang telah diberikan.
- Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Pengelola Perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
10. Sahabat-sahabatku jajaran anak bunshay squad Dila Martanti, Wiwit Ayu Ningsih, Nurul Amalia, Anisa Rahmawati seratrekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Mu'amalah 2015, khususnya Mua'amalah kelas B.
11. Alamamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis diterima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-

mudahanbetapapunkecilnyaskripsiiniidapatbermanfaatdalampengembangandanke
majuanilmupengetahuan, khususnyailmu-ilmukeIslaman.

Bandar Lampung, 2019

Penulis

Ade MaretaHandayani
1521030003



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIAWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam.....	14
1. Pengertian Sewa Menyewa	14
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa	20
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa.....	25
4. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Sewa Menyewa	32
5. Batal atau Berakhirnya Sewa Menyewa	34
6. Manfaat dan Hikmah Sewa Menyewa	38
B. Penetapan Harga (<i>Tas'ir</i>)	40
1. Pengertian <i>Tas'ir</i>	40
2. Dasar Hukum <i>Tas'ir</i>	44
3. Syarat – Syarat <i>Tas'ir</i>	52

4. Macam – Macam <i>Tas'ir</i>	54
--------------------------------------	----

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
1. Sejarah Desa Gunung Agung	56
2. Kondisi Geografis Desa Gunung Agung.....	57
3. Kondisi perekonomian Gunung Agung.....	58
4. Visi dan Misi Pembangunan Desa Gunung Agung.....	60
5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gunung Agung.....	66
6. Sejarah Pasar Desa Gunung Agung	66
7. Struktur Organisasi Pengelola Pasar Desa Gunung Agung ...	69
8. Unit dan Fasilitas Pasar Desa Gunung Agung	69
B. Sistem Sewa Menyewa lapak di Pasar Desa Gunung Agung	70
1. Pelaksanaan sewa-menyewa lapak pasar.....	70
2. Penetapan Harga Dalam Sewa lapak Pasar	80

BAB IV ANALISA DATA.....

A. Perbedaan Harga sewa menyewa lapak di Pasar Unyil	86
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Harga Sewa Menyewa Lapak di Pasar Unyil.....	88

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan	96
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul ini, maka penulis menguraikan terlebih dahulu arti makna dari judul yang akan dibahas. Adapun judul ini adalah TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN HARGA SEWA-MENYEWA LAPAK (Studi di Pasar Unyil Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun istilah – istilah dalam judul ini adalah sebagai berikut :

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “Hukum” dan kata “Islam” kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan juga dalam bahasa Indonesia baku. Hukum islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnahrasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama islam.²

Perbedaan adalah selisih atau hal yang membuat berbeda.

¹ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h.1470

² Amir Syarifuddin, *garis – garis besar fiqh* (Jakarta: kencana prenada media group, 2010), h.9.

Harga adalah alat tukar yang senilai, atau nilai barang yang dirupakan dengan uang atau jumlah uang yang senilai.

Sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang.

Lapak adalah tempat.³

Berdasarkan penjelasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam mengenai penetapan harga sewa lapak pasar Unyil di Desa Gunung Agung menurut hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dalam memilih dan menentukan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Harga Sewa Lapak”** adalah ;

1. Alasan Objektif

Karena adanya praktek perbedaan harga dalam sistem sewa-menyewa lapak sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini didukung oleh literatur yang sangat memadai sehingga dapat diselesaikan. Selain itu judul yang dibahas relevan dengan jurusan Muamalah.
- b. Pembahasan judul ini sesuai dengan disiplin ilmu yang menyusun pelajari di jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Raden Intan

³*Ibid.h.957.*

Lampung serta didukung oleh lokasi penelitian yang sangat terjangkau sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusia senantiasa terlibat dalam suatu akad atau hubungan muamalah. Salah satu praktik muamalah yang dewasa ini sering terjadi adalah sewa menyewa. Sebagai umat Islam sudah sepatutnya kita menjalankan praktik muamalah dengan tetap memegang teguh ajaran Al - Qur'an dan Al Hadits.

Dalam syariat Islam secara garis besar terbagi kepada, pertama, fiqh ibadah meliputi aturan tentang shalat, puasa, zakat, haji, nazar, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Berbeda dengan fiqh muamalat yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, seperti perikatan, sanksi hukum dan aturan lain, agar terwujud ketertiban dan keadilan, baik secara perorangan maupun kemasyarakatan.⁴ Fiqh muamalah mengatur tentang hubungan manusia antara satu dengan yang lain, seperti halnya jual beli, sewa-menyewa, hibah dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan sehari - hari manusia memiliki hubungan erat akan kebutuhan perekonomian untuk melangsungkan kehidupannya, oleh karena itu masyarakat Indonesia tak jarang banyak yang terjun ke dunia usaha.

⁴ Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h.10

Dalam hal melakukan usaha tersebut pelaku usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan akad dalam transaksi ekonomi itu sah atau tidak fasid (rusak).

Salah satu transaksi ekonomi yaitu sewa-menyewa. Perihal sewa-menyewa merupakan transaksi yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat, sebab kebutuhan manusia semakin meningkat maka transaksi ekonomi salah satunya dalam sewa menyewa juga semakin banyak dilakukan. Dalam Islam kegiatan sewa – menyewa disebut dengan Ijarah. Menurut bahasa sewa menyewa berarti Al-‘iwadl yang artinya ganti dan upah (imbalan).⁵ Sewa – menyewa adalah memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat benda atau barang tersebut dengan syarat – syarat rukun tertentu.⁶

Salah dasar hukum dari sewa menyewa adalah firman Allah SWT QS. AL-Zukhruf (43): 32⁷

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

⁵Ibid.

⁶Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Raden Intan Lampung Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame:2015), h.178.

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az- Zukhruf: 32).⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu dapat saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan akad ijarah (upah-mengupah), karena dengan akad *ijarah* itu sebagian manusia dapat mempergunakan sebagian yang lain.

Allah mensyari’atkan manusia agar dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karena itu setiap manusia berlomba-lomba untuk melakukan usaha apa saja yang dapat menghasilkan uang. Dalam praktiknya setiap orang yang terjun dalam usaha bisnis maka mereka harus berhubungan dengan orang lain.

Adapun salah satu pasar yaitu pasar desa. Pasar Desa merupakan pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah desa dan masyarakat Desa. Pasar Desa yang dimaksud disini yaitu pasar unyi Desa Gunung Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, pasar ini dikelola serta dikembangkan oleh aparatur desa dan masyarakat desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Adanya pasar desa ini tentu di dalamnya ada lapak atau tempat yang digunakan oleh para pedagang yang berjualan.

⁸QS Al – Zukhruf(43): 32

Lapak pasar yang ada di Desa Gunung Agung tersebut disewakan untuk setiap para pedagang yang berjualan disana. Dalam praktiknya yang terjadi dipasar Desa Gunung Agung, Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah dalam pelaksanaan sewa menyewa lapak pasar ini adanya perbedaan harga antara pihak penyewa, yaitu pihak penyewa dari penduduk asli Desa Gunung Agung dan penduduk luar Desa Gunung Agung. Adapun dalam satu tahunnya para pedagang harus membayar harga sewa dengan harga yang berbeda. Khusus warga asli Desa Gunung Agung bayarannya lebih rendah dibanding dengan bukan warga asli Desa Gunung Agung.

Islam sangat memperhatikan penetapan harga yang mengandung unsur keadilan demi untuk kemaslahatan manusia. Sebab dalam Islam setiap manusia memiliki hak untuk perlakuan yang sama dalam bentuk transaksi apapun itu dengan harga yang sesuai.

Atas dasar latar belakang tersebut, oleh karena itu relevan untuk dikaji dalam sebuah penelitian dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Harga Sewa Menyewa Lapak” (Studi di Pasar Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan harga sewa lapak di Pasar Unyil Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga sewa lapak di Pasar Unyil Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Didalam penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan manfaat hasil penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Memberikan penerangan tentang perbedaan harga sewa lapak di Pasar Unyil Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- b. Menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam tentang perbedaan harga sewa lapak di Pasar Unyil Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Dalam teoritis, untuk masyarakat penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi mengenai perbedaan harga sewa lapak serta dijadikan pedoman dalam melakukan sewa-menyewa.
- b. Secara praktis menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan masalah perbedaan harga dalam sewa-menyewa (*ijarah*).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan pengertian atas topik, gejala tertentu. Berikut akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan kepada responden.⁹ Pada hakikatnya penelitian lapangan dilakukan dengan menyelidiki secara individu mengenai subjek penelitian dan memberi gambaran realita yang terjadi di masyarakat.

Dalam hal ini peneliti langsung melakukan pengamatan pada sistem sewa-menyewa lapak pasar Desa Gunung Agung serta menggunakan penelitian pustaka sebagai bahan referensi dalam

⁹ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Permatanet, 2014), h.10.

melakukan penelitian dengan menggunakan literatur yang terdapat di perpustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang merupakan penggambaran objek tertentu dan menjelaskan perihal yang terkait dengan atau secara sistematis fakta-fakta dan karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara fakta dan cermat. Data yang dikumpulkan berupa gambaran, dan bukan angka-angka.¹⁰ Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan penelitian yang berkaitan dengan sistem sewa-menyewa lapak pasar.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan, yang memiliki fokus pada penentuan hukum dari sewa-menyewa lapak. Maka dari itu data yang digunakan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari hasil pertanyaan wawancara. Adapun sumber data primernya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang menjadi objek penelitian diantaranya : orang yang terlibat langsung dalam proses sewa menyewa dan aparaturnya.

¹⁰*Ibid.*, h. 6.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersusun serta sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber data sekundernya yaitu buku-buku yang terkait dengan sewa menyewa, penetapan harga (*Ta'sir*), fikih muamalah, al-Qur'an, dan hadist.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹¹ Jadi populasi ini bukan selain daripada orang tetapi obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek dan subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Dalam hal ini yang menjadi populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sewamenyewa lapakdi Pasar Unyil Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berjumlah 20 orang dari warga asli dan 25 orang dari warga luar Desa Gunung Agung.

¹¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 80.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh populasi, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.¹²

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sample*, yaitu sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.¹³ Dalam hal penelitian Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Harga Sewa Lapak, maka kriteria yang penulis pakai yaitu penduduk asli Desa Gunung Agung sebagai penyewa lapak yang sudah menyewa dua tahun lebih, penduduk luar Desa Gunung Agung sebagai penyewa lapak yang sudah menyewa 2 tahun lebih, serta aparatur desa Gunung Agung sebagai informan.

Untuk penelitian ini mengambil sampel sejumlah 9 orang yang telah memenuhi 3 kriteria diatas yaitu terdiri dari 3 orang warga asli Desa Gunung Agung, 3 orang bukan warga asli desa Gunung Agung yang menyewa lapak pasar, serta 3 orang aparatur desa yang menyewakan lapak pasar Unyil.

¹²*Ibid.*, h. 81.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PTRineka Cipta, 2010), h. 183.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) oleh karena itu metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan dan pengamatan mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang di dasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur melalui tatap muka maupun dengan media lainnya.¹⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis dalam penelitian, lalu data-data yang didapat melalui dokumen-dokumen tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah secara relevan dengan objek penelitian.

¹⁴*Ibid.*, h. 138.

6. Metode pengolahan Data

Setelah data relevan dengan judul dan terkumpul, kemudian data diolah dengan cara :

a. Editing

Editing adalah pengoreksian atau pengecekan data yang telah dikumpulkan, karena ada kemungkinan data yang dikumpulkan tidak logis dan meragukan.¹⁵

b. Sistematis

Sistematis adalah melakukan pengecekan pada data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi yang diperoleh.

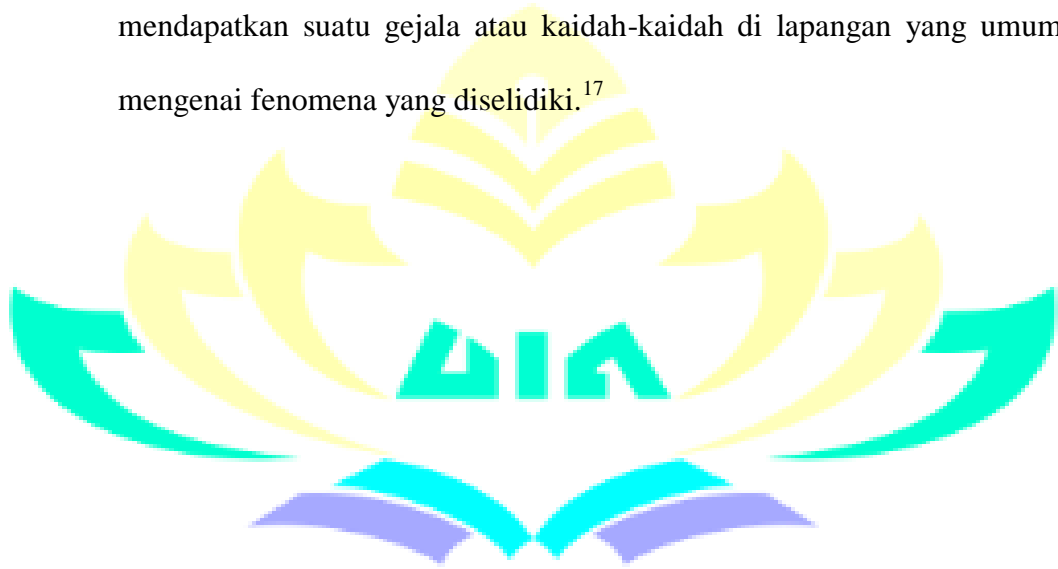
7. Metode Analisa Data

Metode analisa data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga dapat diperoleh temuan berdasarkan focus masalah yang ingin dijawab. Pada analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Setelah data terkumpul semua maka proses selanjutnya yaitu mengambil kesimpulan dari data yang sudah terkumpul, dengan menggunakan metode analisa data kualitatif yang artinya data

¹⁵ Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 85.

yang berupa pendapat sehingga tidak berupa angka, tetapi berupa kata atau kalimat.¹⁶

Metode berfikir dalam penulisan yaitu metode induktif, metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.¹⁷



¹⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah (Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2010), h.191.

¹⁷ *Ibid.*, h 4.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Sewa-Menyewa

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Pada *ijarah* tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek *ijarah*. Objek *Ijarah* tetap menjadi milik yang menyewakan.¹⁸ Dalam ekonomi Islam, jasa dikaitkan dengan *Ijarah* (sewa-menyewa). Penjualan jasa dalam Islam disebut dengan *Ijarah* atau sewa menyewa, yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata sewa memiliki arti pemakaian sesuatu dengan membayar uang¹⁹, Sedangkan menurut istilah, sewa (*Al-Ijarah*) adalah menyerahkan manfaat dengan jalan penggantian.²⁰

Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seseorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilik harta dari pihak *musta'jir* oleh seseorang *mu'jir*.”²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan atas barang itu

¹⁸Adiwarma A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta:PT Raja grafindo Persada,2007) hlm.74.

¹⁹WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Balai Pustaka, 1976), cet X, h.193.

²⁰Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), Hlm.29

²¹Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun system ekonomi alternative perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gustu,1996),hlm.83.

sendiri.²² Adapun menurut Labib Mz yang dimaksud *ijarah* yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Barang-barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun tertentu.²³

Objek dari kegiatan *Ijarah* adalah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang.²⁴

Sebenarnya konsep *Ijarah* sama dengan konsep jual beli. Hanya saja, objek yang diperjualbelikan dalam *ijarah* adalah jasa, sedangkan dalam jual beli, yang diperjualbelikan adalah barang atau benda.²⁵ *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, berarti *al-iwadh* (upah atau ganti). Sedangkan *Ijarah* menurut bahasa, yaitu *bai'al-manfaah* yang berarti jual beli manfaat.²⁶

Berikut uraian dari beberapa pengertian *Ijarah*;

a. Menurut bahasa (etimologi), sewa menyewa berarti

بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ

“menjual manfaat”

²²Fatwa DSN-MUI, no. 09/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Ijarah*.

²³Labib Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h.29.

²⁴Ascarya, *Akad dan Produk bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.75.

²⁵Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm.231.

²⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h.129

b. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah sebagai berikut;

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan sewa-menyewa antara lain:

1) Menurut Ulama Hanafiyah definisi sewa menyewa yaitu,

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.”

2) Menurut Ulama Asy-Syafi’iyah definisi sewa menyewa yaitu,

عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُبَا حَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْأَلَاءِ بِأَحَدِ عَوَضٍ مَّعْلُومٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

3) Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah definisi sewa menyewa adalah:

تَعْلِيْقُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَا حَةٍ مُدَّةً مَّعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”

Ulama mazhab Maliki menjelaskan bahwa Ijarah merupakan dua kata yang semakna dari searti, hanya saja mereka mengatur dalam pemberian nama dan perjanjian atas manfaat manusia dan sebagai barang yang di pindahkan seperti bekakas

rumah tangga, pakaian, dan bejana serta semisalnya dengan istilah *Ijarah*.²⁷

4) Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-khatib, sewa menyewa yaitu,

تَمْلِكُ مَنَفَعَةَ بَعْوَضٍ بِشَرْطٍ

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa *Ijarah* adalah menjual manfaat danyang boleh di sewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya melainkan bendanya.²⁸

Menurut pengertian Hukum Islam, sewa – menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²⁹ Menurut hukum Perdata (BW) pada Pasal 1548, sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuai dengan harga yang oleh pihak tersebut belakang itu disanggupi pembayarannya.³⁰

²⁷ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Empat Mazhab Jilid IV*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h.170.

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001 h) h.122

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012, h 155.

³⁰ R. Subekti dan R. Tjiptrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Paramadya, 2006 M.), hlm.

Dari beberapa pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa (*Ijarah*) adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi, bedanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.³¹ Sementara itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan *Ijarah*, “*Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran*’.

Dalam istilah Hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan diistilahkan *ma'jurdan* uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ajran* dan *ujrah*.³²

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewa (*mu'ajir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*).³³ Dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).

³¹ Idri, *Op.Cit.*, hlm.233.

³² *Loc.Cit.*

³³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.135.

Menurut hukum Islam, sewa menyewa (*Ijarah*) itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu:³⁴

1) *Ijarah 'ain*, yakni Ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, dengan kata lain yang di pindahkan hanya *usufruct* atau dalam bahasa Arab disebut *manfaah*.³⁵ baik benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah.

2) *Ijarah amal*, yakni Ijarah terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah. *Ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya.³⁶ Pekerjaan yang menjadi objek dalam Ijarah tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban musta'jir seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain. Sehubungan dengan prinsip ini mengenai Ijarah, mu'adzin, Imam, dan pengajar Al-Qur'an.

Menurut Fuqaha Hanafiah dan Hanabilah ijarah yang demikian tidak sah. Alasan mereka perbuatan tersebut merupakan taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Syafe'iy melakukan *Ijarah* dalam hal-hal tersebut boleh. Karena

³⁴Rozalinda, *Op.Cit.* h.61-62.

³⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta:Kencana, 2014).Hlm.272.

³⁶Rozalinda, *Op.Cit.* h.62.

berlaku pada pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi.³⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa adalah memberikan sesuatu barang atau benda yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima, di mana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang atau benda tersebut dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.³⁸

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Masalah hukum boleh atau tidaknya transaksi sewa-menyewa sebenarnya hukum setiap kegiatan bermu'amalah adalah boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: Hukum asal menetapkan syarat dari mu'amalah adalah halal dan di perbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.³⁹

Landasan Hukum tentang perjanjian sewa menyewa dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, hadis, Ijma', serta ketentuan hukum positif. penjelasan mengenai dasar hukum tersebut, yakni sebagai berikut.

³⁷Fakhir Ghofur, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.164.

³⁸Khumedi Ja'far, *Op.Cit.* h.134.

³⁹<https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>

a. Al-Quran.

Al-Quran adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama.⁴⁰

1) Q.S. Az-Zukhurf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۖ وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan⁴¹. ”

Tafsir ayat di atas menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin dalam hal harta yang mereka miliki beserta segala fasilitasnya termasuk juga derajat mereka yang berbeda, semua itu merupakan ketentuan (takdir) Allah agar mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Di sinilah berlaku penjualan jasa kepada orang yang membutuhkan satu dengan yang lain. Karena seseorang tidak akan bisa melakukan segala sesuatunya tanpa jasa atau layanan orang lain. Orang kaya tidak mungkin dapat membangun rumahnya sendiri tanpa jasa para tukang dan kuli bangunan, mereka tidak

⁴⁰ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 13.

⁴¹ Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2006), h.26.

mungkin mampu memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain meskipun mereka mempunyai banyak uang.

2) Q.S.Al-Qashash 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai Ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat di percaya.

b. Hadis

As-Sunnah adalah pembicaraan yang diriwayatkan atau diasosiasikan kepada Nabi Muhammad Saw. Ringkasnya, segala sesuatu yang berupa berita yang di katakan berasal dari Nabi di sebut As-Sunnah. Boleh jadi berita itu berwujud ucapan, tindakan, pembicaraan (*taqrir*), keadaan, kebiasaan, dan lain-lain.⁴² Adapun sunnah yang menerangkan tentang sewa menyewa adalah

a. HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar

أَعْطُوا أَلَّا جِئَرَا جَرَهُ

(رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

“Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka.” (HR Abu Ya’la, Ibnu Majah, ath-Thabrani, dan at-Tirmizi).⁴³

⁴²Muh Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis&Metodologis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, cet. Ketiga, 2011), h.1.

⁴³Rachmat Syafe’i, *Op.Cit.*, h.124.

b. HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ
(رواه عبد الرزاق عن أبي هاريرة)

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beri tahukanlah upahnya.”(HR ‘Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi).

c. HR Abdullah ibn’ Abbas

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَاجِمَ أَجْرَهُ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْمُسْلِمُ وَأَبُو حَمْدٍ بْنُ حَنْبَلٍ)

“Rasullullah saw. berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya.” (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hanbal).

c. Ijma

Selain al-quran dan as-Sunnah, dasar hukum Ijarah adalah Ijma’. Umat Muslim pada masa sahabat telah ber-ijma’ bahwa ijarah di perbolehkan karena bermanfaat bagi manusia, semua ulama sepakat dan tidak ada seorang ulama yang membantah kesepakatan ijma’ ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat.⁴⁴

Mengenai Ijarah ini juga sudah mendapatkan ijma’ ulama, berupa kebolehan seorang Muslim untuk membuat dan melaksanakan akad ijarah atau perjanjian sewa-menyewa. Hal ini sejalan juga dengan

⁴⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.117

prinsip muamalah, bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.⁴⁵

Dengan tiga dasar hukum yaitu Al-Quran, Al-Hadist, dan Ijma' maka hukum diperbolehkannya sewa-menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama.⁴⁶ Demikian dasar hukum di atas maka hukum diperbolehkannya sewa menyewa tersebut merupakan legalitas sumber hukum Islam yang utama. Dari beberapa sumber hukum di atas dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sebab manusia senantiasa memiliki keterbatasan dan kekurangan. Sehingga sewa menyewa merupakan transaksi ekonomi yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Landasan Hukum Positif

Landasan Ijarah dalam hukum positif dapat di jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah. Hal ini dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan mengenai prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum secara khusus telah di atur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka (25) intinya menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau

⁴⁵Khotibah Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) hlm.123.

⁴⁶Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001, hlm.123.

tagihan yang di persamakan dengan itu berupa transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa menyewa atau sewa-beli dalam bentuk muntahiya bittamlik.⁴⁷

3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa

Agar transaksi sewamenyewa atau upah mengupah menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun perbedaan rukun dan syarat sewa menyewa menurut hukum Islam, rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa menyewa, dan tidak akan terjadi sewa-menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut, sedangkan syarat sewa menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa menyewa itu sendiri.⁴⁸ Unsur-unsur atau rukun *ijarah* adalah:

- a. Pemilik yang menyewakan manfaat yang disebut *mu'jir*(orang yang menyewakan).
- b. Orang yang memberikan di sebut *musta'jir* (orang yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa atau penyewa).
- c. Sesuatu yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan) dan,
- d. Jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat di sebut *ajran* atau *ujrah* (upah).⁴⁹

⁴⁷ Khotibah Umam, Setiawan Budi Utomo, *Op.Cit.*h.124.

⁴⁸ Iman Suryaman, Skripsi: "*Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem "Emplong"*"(Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018, h.29-30.

⁴⁹ Idri, *Op.Cit.*,h.235.

Menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu terdiri dari:

- a. dua orang yang melakukan akad (*muajir dan musta'jir*),
- b. *shigat*(*Ijab* dan *qabul*),
- c. *ujrah* dan *manfa'ah*.

Sedangkan syarat ijarah terdiri dari empat syarat sebagaimana syarat dalam akad jual beli, yaitu:

- a. *Syarat in'iqad* yaitu syarat yang berkaitan dengan terjadinya akad seperti *Aqid* (orang yang berakad) di syatkan berakal dan *mumayiz*.
- b. *Syarat nafadz*, yaitu syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad bahwa dalam syarat barang yang dijadikan sebagai objek ijarah mesti sesuatu yang dimiliki secara penuh.

Menurut ulama mazhab Hanafi, Rukun Ijarah hanya ada satu yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa-menyewa).

Adapun menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun ijarah ada empat yaitu:

- a. *Muta'qidan* (orang yang menyewa dan yang menyewakan), masing-masing harus memenuhi syarat:
 - 1) Harus ahli dalam menjalankan akad, tidak boleh gila atau orang yang di larang mengelola uangnya (mahjur) dan,

2) Harus atas kehendaknya sendiri, karena kata-kata orang yang dipaksa itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap terjadinya akad atau pembatalan kontrak.

Dengan kata lain, kedua belah pihak yang melakukan akad sudah dewasa dan tidak ada paksaan yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Syarat kedewasaan merupakan hal yang sangat rasional, karena orang dewasa adalah yang mampu melakukan akad dengan sempurna. Sehubungan dengan syarat kedewasaan ini, para ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa tidak sah akadnya anak-anak, meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*mumayyiz*). Berbeda dengan mereka, ulama mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia dewasa (*baligh*), tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *Ijarah*, dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

Demikian pula dengan syarat tidak adanya unsur paksaan karena dengan syarat tersebut akan dapat menghindarkan ketidakrelaan dari kedua belah pihak dan akibat-akibat buruk lainnya. Apabila salah satu pihak dan akibat-akibat buruk lainnya. Apabila salah satu pihak ada yang dipaksa untuk menyewakan barangnya, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut dianggap batal.

b. *Shigat*(*Ijab* dan *qabul*)

Shigat (*Ijab* dan *qabul*) yaitu harus ada kesepakatan *ijab* dan *qabul*. Hendaknya *Ijab* dan *Qabul* itu memakai kalimat yang biasa dipakai. *Ijab* dan *qabul* dalam sewa-menyewa merupakan segala sesuatu baik perkataan atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Dalam *Ijab* dan *qabul* tidak diharuskan menggunakan kata-kata khusus, yang diperlukan adalah saling ridla (*rela*) antara kedua belah pihak.

c. Adanya manfaat penyewaan (*ma'qud 'alayh*).

Ma'qud alayh adalah manfaat barang atau benda yang menjadi objek sewa dan pembayaran (*uang*) sewa sebagai imbalan atau ganti dari manfaat barang atau benda yang menjadi objek sewa-menyewa. Syarat manfaat penyewaan adalah:

- 1) Hendaklah manfaat itu bisa ditaksir atau dihargai.
- 2) Hendaknya manfaat itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang menyewa.
- 3) Hendaknya manfaat itu menurut keseriusan dan tidak main-main.
- 4) Objek sewa-menyewa harus jelas dan bernilai, hal ini perlu untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu barang yang akan dijadikan objek sewa-menyewa perlu diketahui mutu dan kegunaanya.

5) Objek sewa-menyewa haruslah barang yang halal, bukan yang haram.

6) Barang yang menjadi objek sewa-menyewa harus dapat diserahkan dan dapat dimanfaatkan.

7) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam agama. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak diperbolehkan dalam agama adalah tidak sah dan wajib untuk di tinggalkan, misalnya sewa-menyewa rumah untuk prostitusi.

8) Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukan (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

d. Sewa atau imbalan. Syarat sahnya sewa atau imbalan adalah:

1) Imbalan sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Pembayaran (uang) sewa haruslah bernilai yang jelas.

2) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya juga harus lengkap.

Di samping rukun, para ulama juga menetapkan syarat-syarat ijarah.

Diantara syarat-syarat itu adalah:

- 1) Masing-masing pihak rela untuk melakukan sewa-menyewa, maksudnya kalau di dalam akad sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam surah *an-Nisa* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

- 2) Harus jelas objek yang diakadkan, maksudnya barang yang disewakan disaksikan sendiri oleh penyewa, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
- 3) Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan.

- 4) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam hukum Islam adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Tidak boleh menyewakan babi, berhala, darah, dan bangkai.
- 5) Orang yang menyewakan adalah pemilik barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali. Karena itu, tidak boleh seseorang menyewakan benda atau barang milik orang lain, meskipun saudaranya atau temannya sendiri kecuali bertindak sebagai wali atau mendapat izin untuk mewakilinya.
- 6) Objek sewa-menyewa dapat diserahkan, yaitu barang yang menjadi objek sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk di beli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa-menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa. Jika barang yang disewakan tidak dapat diserahkan, seperti menyewakan burung yang terbang di angkasa atau ikan yang ada di lautan, maka akad ijarah batal.
- 7) Objek sewa-menyewa tidak cacat, yaitu barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut tidak cacat yang dapat menghalangi pengambilan manfaat dari barang tersebut. Dalam hal ini, bila barang mengalami cacat pada saat digunakan, maka dipandang

perjanjian batal, kecuali bila orang yang menyewakan (*mu'jir*) menggantikannya dengan barang lain yang sama porsinya.

8) Sesuatu yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melakukan shalat atau puasa untuk diri penyewa, perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena shalat dan puasa termasuk kewajiban individu yang mutlak harus dikerjakan sendiri oleh orang yang terkena kewajiban.

9) Upah/sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. misalnya seseorang menyewa mobil yang dibayar oleh penyewa dengan menyewakan mobilnya sendiri kepada orang yang memberikan sewa atau orang menyewa emas yang dibayar dengan emas.

10) Harga sewa harus dibayar, bila berupa uang harus ditentukan berapa besarnya, dan bila berupa hal lain harus ditentukan berapa kadarnya. Jika harga sewa tidak dibayar, maka penyewa mempunyai utang yang harus dilunasi.

11) Tidak boleh dikaitkan dengan syarat perjanjian lain.

12) Harus segera dapat dimanfaatkan pada saat terjadinya persetujuan, kecuali dalam sewa-menyewa yang ditentukan menurut waktu.

4. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Sewa Menyewa

Dalam transaksi sewa-menyewa terdapat hak dan kewajiban yang dapat dan/atau harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan atau yang menerima sewa.

a. Hak dan kewajiban pihak penyewa (*musta'jir*), yaitu

1) Hak pihak penyewa

- a) Memanfaatkan barang yang disewa.
- b) Mendapatkan jaminan akan barang yang di sewa.
- c) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap barang yang di sewa.

2) Kewajiban pihak penyewa

- a) Wajib menggunakan barang yang disewakan menurut syarat-syarat akad atau menurut kelaziman penggunaannya.
- b) Menjaga keutuhan barang yang disewa atau tidak merusak barang yang disewa.
- c) Memberikan bayaran atau uang sewaan terhadap barang yang disewa kepada pihak yang menyewakan.⁵⁰
- d) Mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak (yang menyewakan dan menyewa).⁵¹

b. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (*mu'jir*)

1) Hak pihak yang menyewakan

- a) Berhak menerima segala harga sewaan.

2) Kewajiban pihak yang menyewakan

- a) Wajib mempersiapkan barang yang disewakan untuk dapat digunakan secara optimal oleh penyewa.⁵²

⁵⁰ Adhiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). h.101.

⁵¹ Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*h.137.

⁵² Adhiwarman A.Karim, *Op.Cit.*

- b) Menyerahkan barang yang menjadi objek sewa-menyewa.
- c) Mengizinkan pemakaian barang yang disewakan kepada orang yang menyewanya.
- d) Memelihara kebersihan barang yang di sewakannya, kecuali jika kerusakan tersebut ditimbulkan oleh pihak penyewa.⁵³

5. Batal dan Berakhirnya Sewa Menyewa

Setiap transaksi dalam ijarah tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah di sepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang di tentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah pekebunan, maka semua barang sewaan tersebut dalam harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera di bayar upahnya.
- b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad ijarah, menurut mereka tidak bisa di wariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad ijarah, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.

⁵³Idri, *Op.Cit.* hlm.240.

c. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang di sewakan di sita negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi ijarah batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi ijarah menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, suatu contoh apabila ada seseorang di bayar untuk menggali atau ngebor air di bawah tanah, sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. beda dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi ijarah hanyalah objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.⁵⁴

Pada dasarnya sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, di mana kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak boleh saling merusaknya, karena jenis perjanjian tersebut termasuk kepada perjanjian timbal balik. Bahkan apabila salah satu pihak (yang menyewakan atau yang menyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal selama yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa itu masih tetap ada. Sebab apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh ahli warisnya, baik dari pihak yang menyewakan maupun dari pihak yang menyewa.

Akan tetapi menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad ijarah, menurut mereka tidak bisa diwariskan.

⁵⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.238.

Begitu juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa oleh pihak yang menyewakan tidak menyebabkan putusnya perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian dapat terjadi apabila terdapat dasar atau alasan-alasan yang kuat untuk itu. Menurut Jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal, manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waras karena manfaat juga termasuk harta.⁵⁵

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan batal atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa adalah :⁵⁶

a. Terjadinya aib (kecacatan) pada barang sewaan.

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa. Dalam hal ini kerusakan diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukannya, barang sewaan disalahgunakan, dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu pihak yang menyewakan dapat dimintakan pembatalan kepada pihak yang menyewa.

b. Rusaknya barang yang di sewa

Maksudnya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau rusak sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah rumah,

⁵⁵Sohari Sahari, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

⁵⁶Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h.139.

dan ternyata rumah itu terbakar habis, maka dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan kepada pihak penyewa.

c. Masa sewa menyewa telah habis

Maksudnya jika apa yang menjadi tujuan sewa-menyewa telah tercapai atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang di sepakati oleh para pihak, maka akad sewa-menyewa berakhir. Namun jika terdapat uzur yang mencegah fasakh, seperti jika masa sewa-menyewa tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai di ketam, sekalipun terjadi pemaksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kerugian pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

Kesimpulannya bahwa masa sewa menyewa yang telah diperjanjikan sebagaimana yang telah disepakati bersama telah habis, maka dengan sendirinya perjanjian sewa menyewa telah berakhir (batal).

d. Adanya Uzur

Maksud uzur disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau di rampok orang atau bangkrut sebelum toko itu dipergunakan, maka dalam hal seperti ini pihak penyewa dapat

memintakan pembatalan perjanjian sewa menyewa yang telah disediakan sebelumnya kepada pihak yang menyewakan. Ulama hanafiyah menjelaskan bahwa adanya uzur merupakan salah satu penyebab berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datang dari salah satu pihak. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa yang telah diadakan sebelumnya.⁵⁷

Dalam hal ini peneliti berpendapat walaupun ada beberapa pendapat yang berbeda, tetapi pada prinsipnya batal berakhirnya sewa-menyewa itu sama saja.

6. Manfaat dan Hikmah Sewa Menyewa

Ijarah merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak memilikinya. Kebutuhan terhadap manfaat (jasa) seperti halnya kebutuhan terhadap barang-barang. Orang miskin membutuhkan harta dari orang kaya. Sebaliknya, orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip

⁵⁷Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.57.

diberlakukannya transaksi. Oleh karena itu, ijarah sesuai dengan prinsip syari'ah Islam.⁵⁸

Manfaat dan hikmah sewa menyewa sangatlah besar, karena sewa menyewa merupakan bentuk kebijaksanaan Allah SWT untuk hambanya. Karena semua manusia mempunyai kebutuhan untuk dipenuhi guna melanjutkan hidupnya seperti sandang, pangan, dan papan.

Adapun hikmah dari sewa menyewa antara lain sebagai berikut:

- a. Dapat ikut memenuhi hajat orang banyak.
- b. Menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain.
- c. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penyewa dan yang menyewakan.
- d. Dengan adanya sewa menyewa maka dapat melaksanakan kegiatan muamalah.
- e. Menghindari sifat barang yang mubazir.
- f. Dengan adanya sewa-menyewa tersebut seseorang dapat menerima faedah daripada barang yang di sewakan.⁵⁹

⁵⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah: Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), h.316.

⁵⁹ Khumedi Ja'far, *Op.Cit.* h.139.

B. Penetapan Harga (*Tas'ir*)

1. Pengertian *Tas'ir*

Kata *tas'ir* berasal dari kata *sa'ara-yas'ran* yang artinya menyalakan. Secara etimologi kata *at-tas'ir* (التسعير) seakar dengan kata *as-si'r* (السعر = harga) yang berarti penetapan harga. Kata *as-si'r* ini di gunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalaan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu. Dikatakan, *sa'arat aasy-syay a tasiran*, artinya menetapkan harga sesuatu yang merupakan titik berhenti tawar-menawar. Jika dikatakan, *as'aru wa sa'aru*, artinya mereka telah bersepakat atas suatu harga tertentu. Oleh karena itu, *tas'ir* secara bahasa berarti *taqdir as-si'ri* (penetapan/penentuan harga).⁶⁰

Dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. "*As-saman*" adalah harga satuan barang atau nilai sesuatu. Sementara "*as-si'r*" adalah harga yang di tentukan untuk barang dagangan.⁶¹ Kata *as-si'ru* jamaknya *as'ar* artinya harga (sesuatu). Kata *as-si'ru* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar). Fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan

⁶⁰Qusthoniah, "Tas'ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi" *Jurnal Syariah*, Vol. II No. II (Oktober 2014), h. 82.

⁶¹Rozalinda, *Op.Cit.*, h.379.

as-si'ir bukan as-saman karena as-si'ir merupakan harga aktual yang terbentuk dalam proses jual beli.⁶²

Adapun menurut pengertian syariah, terdapat beberapa pengertian. Menurut Imam Ibnu Irfah (ulama Malikiyah):

هُوَ تَحْدِيدُ حَاكِمِ السُّوقِ لِبَائِعِ الْمَأْكُولِ فِيهِ قَدْرًا لِلْمَبِيعِ بِدِرْهِمٍ مَعْلُومٍ

“Tas'ir adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasardengan sejumlah dirham tertentu.”

Menurut Syaikh Zakariya Al-Anshari (ulama Syafi'iyah):

أَنْ يَأْمُرَ الْوَالِي السُّوقَةِ أَنْ لَا يَبِيعُوا أَمْتَعَتَهُمْ إِلَّا بِسِعْرِ كَذَا

“Tas'ir adalah penetapan suatu harga oleh Imam (Khalifah) atau wakilnya atas masyarakat dan Imam memaksa mereka untuk berjual beli pada harga itu.”

Menurut Imam Syaukani:

هُوَ أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَوْ نَوَّابُهُ أَوْ كُلُّ مَنْ وَلَّى أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْلَ السُّوقِ إِلَّا

يَبِيعُوا أَمْتَعَتَهُمْ إِلَّا بِسِعْرِ كَذَا فَيَمْنَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَوْ النُّقْصَانِ لِمَصْلَحَةٍ

“Tas'ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu dan di larang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena alasan maslahat.”

Adapun definisi menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani:

التَّسْعِيرُ هُوَ أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَوْ نَوَّابُهُ أَوْ كُلُّ مَنْ وَلَّى أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْلَ

السُّوقِ إِلَّا يَبِيعُوا السَّلْعَ إِلَّا بِسِعْرِ كَذَا فَيَمْنَعُوا مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَغْلُوا

الْأَسْعَارُ أَوْ النُّقْصَانُ عَنْهُ حَتَّى لَا يُضَارِبُوا غَيْرَهُمْ أَيْ يَمْنَعُونَ مِنَ الزِّيَادَةِ أَوِ النُّقْصَانِ

السَّعْرِ لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ

“Tas'ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu,

⁶²Ibid., h.380.

dan mereka di larang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka di larang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.”⁶³

Dari berbagai definisi tersebut, sebenarnya maknanya hampir sama. Kesamaanya ialah definisi-definisi tersebut selalu menyebutkan tiga unsur yang sama. Pertama, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. Kedua, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Ketiga, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.

Dalam hal ini juga Sayyid Sabiq menjelaskan *tas'ir* berarti:

التَّسْعِيرُ مَعْنَاهُ وَضْعُ مُحَدَّدٍ لِلسَّاعِ الَّتِي يُرَادُ بَيْعُهَا بِحَيْثُ لَا يَظْلُمُ الْمَالِكُ وَلَا يَرْهَقُ الْمُشْتَرَى.

“Al-Tas’ir berarti menetapkan harga tertentu untuk barang dagangan yang di jual selama tidak ada kezaliman penguasa dan tidak pula kezaliman penguasa dan tidak pula kezaliman terhadap pembeli.”

Menurut ulama Madzhab Hambali:

Al tas’ir al jabari dengan upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditas, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya.⁶⁴

Menurut Ibnu Taimiyah mengemukakan *tas'ir* dengan keadaan yang mewajibkan para pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga pasaran.⁶⁵

⁶³ Rozalinda, *Op.Cit.*, h.380.

⁶⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intrastama, 1997), h.1803.

⁶⁵ Rozalinda, *Op.Cit.*, h.380.

Sesuai dengan kandungan definisi-definisi di atas, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pelaku pedagang dan para pelaku konsumen. Dengan demikian, apapun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu negara untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga.

Dengan demikian *tas'ir*, penetapan harga oleh pemerintah kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu. Jadi, mereka dilarang untuk menambah atau mengurangi dari harga yang di patok demi kemaslahatan masyarakat. Artinya, negara melakukan intervensi (campur tangan) atas harga dengan menetapkan harga tertentu atas suatu komoditas dan setiap orang dilarang untuk menjual lebih atau kurang dari harga yang ditetapkan itu demi mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.⁶⁶

Dari berbagai definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah sebagai penguasa berhak mengeluarkan kebijakannya melalui penetapan harga di mana kebijakan tersebut mengandung kemaslahatan pada masyarakat yang akan bermuara pada maqasid syariah atau tujuan akhir ilmu fiqh adalah mencapai keridhoan Allah SWT dengan

⁶⁶*Ibid.*, h. 381.

melaksanakan syariahnya di muka bumi ini, sebagai pedoman hidup individual, berkeluarga, maupun hidup bermasyarakat.

2. Dasar Hukum Penetapan Harga (*Tas'ir*)

Sebagian ulama berbeda pendapat bahwa campur tangan ini memperoleh landasannya pada firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (An-Nisa’: 59)

Nash di atas memberikan hak campur tangan kepada pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu. Hal itu untuk menjaga masyarakat Islam dan menegakkan keseimbangan dalam masyarakat. Nash itu mewajibkan atas semua umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka. Para penganut pada pendapat ini menambahkan bahwa “ulil amri” adalah mereka yang melaksanakan kedaulatan hukum syara’ terhadap umat Islam, meskipun di sana ada perbedaan pendapat di antara para fuqaha (ahli hukum Islam) dalam menentukan dan membataskan syarat-syarat ulil amri.⁶⁷

⁶⁷Evra Wilya, “Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas’ir Al Jabari”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir’a*, Vol.11 No. 2 (2013). h.7.

Landasan *at-tas'ir* selanjutnya adalah surat al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (Al-Hadid: 25)

Penyebutan keadilan dan besi secara bersamaan dalam ayat ini menunjukkan adanya indikasi akan pentingnya penerapan keadilan dan kebenaran dengan bantuan kekuatan (yang dalam ayat ini di sebut dengan besi, sebagai simbol kekuatan). Dengan demikian negara hendaknya mempergunakan kekuatan, jika itu dibutuhkan, untuk menegakkan keadilan ekonomi.⁶⁸

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam Al-Quran. Adapun dalam hadits Rasulullah saw dijumpai beberapa hadits, yang dari logika hadits itu dapat diinduksi bahwa penetapan harga itu dibolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir*, menurut kesepakatan ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah*.⁶⁹

⁶⁸Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, penerjemah Samson Rahman, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.160.

⁶⁹Qusthoinah, *Op.Cit.*,h.84.

Hadits Rasulullah saw yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu di katakan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَلَّا السَّعْرُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَّا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَ لَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَ لَا مَالٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْمُسْلِمُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَهَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ ابْنُ جَبَّانَ)

“pada zaman Rasulullah saw, terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap kepada Rasulullah saw seraya berkata: ya Rasulullah, harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah saw, menjawab: sesungguhnya Allahlah yang (berhak)menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan jangan seseorang di antara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa.”

Dalil lainnya, hadits Nabi saw :

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

“Janganlah orang kota menjual kepada orang dusun, biarkanlah manusia, Allah akan memberi rizki kepada mereka sebagian dari sebagian lainnya.”

Dari hadits ini Rasulullah saw melarang orang kota yang tahu harga menjual barang dagangan kepada orang dusun yang tidak tahu harga. Karena hal ini akan dapat melonjakkan harga. Maka tas'ir dibolehkan agar tidak terjadi pelonjakan harga.

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah hukum *tas'ir*. Jumhur ulama dari ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, seperti Ibnu Qudamah, ulama *muta'akhhirin* seperti Imam Syaukani dan Imam

An-Nabhani mengharamkan secara mutlak penetapan harga oleh pemerintah (*tas'ir*).⁷⁰ Mereka mendasarkan ini pada QS An-Nisa (4: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Perdebatan para ulama tentang Ta'sir

- 1) Menurut jumhur ulama, *tas'ir* bertentangan dengan nash-nash yang terdapat dalam Al-Qu'ran dan Hadis. Sebab, *tas'ir* bermakna pemaksaan atas penjual dan atau pembeli untuk berjual-beli dengan harga tertentu. Ini melanggar kepemilikan seseorang karena kepemilikan itu bermakna memiliki kekuasaan atas harta miliknya. Karena itu, ia berhak menjual dengan harga yang ia sukai. Pematokan harga tentu akan menghalangi atau merampas sebagian kekuasaan seseorang atas hartanya. Sesuai keterangan nash di atas, hal itu tidak boleh terjadi.⁷¹
- 2) Menurut Ibn Qudamah al-Maqdisi menyatakan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga, masyarakat boleh

⁷⁰ Rozalinda, *Op.Cit.*, 382.

⁷¹ Rozalinda, *Ibid.*, h.383.

menjual barang-barang mereka dengan harga berapa pun yang mereka sukai.

3) Menurut ulama Mazhab Hanbali, ada dua alasan tidak diperkenankannya pemerintah menetapkan harga. *Pertama*, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. *Kedua*, menetapkan harga adalah suatu kezaliman. Jual beli melibatkan hak milik seseorang, di dalamnya ia memiliki hak untuk menjual pada harga berapa pun sesuai dengan kesepakatannya dengan pembeli.

4) Menurut Sayyid Sabiq juga menyatakan terlarang melakukan *tas'ir* berdasarkan ketentuan hadis riwayat Anas ibn Malik di atas. Menurutny berdasarkan hadis ini para ulama menetapkan haram hukumnya melakukan *tas'ir* karena hal ini dikhawatirkan mendatangkan kezaliman. Sementara manusia bebas melakukan transaksi terhadap hartanya.

5) Menurut Yahya Bin Umar, berpendapat bahwa *al-tas'ir* (penetapan harga) tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan berbagai hadis Nabi saw tentang larangan *tas'ir*. Yahya bin Umar melarang kebijakan penetapan harga (*tas'ir*) jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia. Pemerintah, sebagai intitusi formal

yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktifitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas. Yahya menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, kecuali dalam dua hal, yaitu :

- a) Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain didasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum.
- b) Para pedagang melakukan praktik *siyasah al-ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah di praktikkan Umar bin al-Khattab ketika ia mendapati seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya di bawah harga pasar. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan harga sesuai dengan harga standar yang berlaku atau pergi dari pasar.

Pernyataan Yahya tersebut jelas mengidentifikasi bahwa hukum asal intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru dapat dilakukan jika dan hanya jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial di setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi.

Pendapat yang paling kuat, jumhur ulama yang mengharamkan *tas'ir* secara mutlak, baik itu *tas'ir* untuk melindungi kepentingan pedagang maupun *tas'ir* untuk melindungi kepentingan pembeli. Hal itu di karenakan dalil-dalil yang mengharamkan *tas'ir* bersifat mutlak, atau tanpa disertai dengan *taqyid*, yaitu pemberian sifat atau syarat atau batasan tertentu. Jadi tidak ada dalil yang menerangkan *tas'ir* yang diharamkan hanyalah yang bersifat zalim, sedang *tas'ir* yang bersifat adil dibolehkan. Dalil *taqyid* seperti ini tidak ada. Yang ada justru adalah dalil mutlak dari hadis Anas r.a di atas, yaitu bahwa *tas'ir* adalah kezaliman.⁷²

Adapun di kalangan ulama Hanafiyah dan sebagian besar ulama mazhab Hambali abad pertengahan Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziah membedakan antara penetapan harga yang bersifat zalim dan yang adil.

Menurut mereka, penetapan harga yang bersifat zalim hukumnya dilarang. Sedangkan yang bersifat adil hukumnya dibolehkan, bahkan menjadi wajib jika memang di perlukan. Penetapan harga yang bersifat

⁷² Rozalinda, Op.Cit. hlm 384.

zalim jika persediaan barang terbatas sementara permintaan barang tinggi. Pada saat seperti itu, jika pemerintah menetapkan harga, berarti mereka melakukan kezaliman. Penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka sukai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama, hal ini dinyatakan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Anas bin Malik di atas. Menurut hadis ini Rasulullah Saw. Tidak menetapkan harga meski terjadi pelonjakan harga di pasar. Diharamkannya penetapan harga dalam hadis di atas bertujuan untuk menghindari perlakuan zalim terhadap para pedagang, karena kenaikan harga yang terjadi bukan kehendak sewenang-wenang para pedagang. Penetapan harga dikatakan adil jika para pedagang terbukti mempermainkan harga, sehingga merugikan kepentingan orang banyak. Penetapan harga diberlakukan apabila ada kezaliman dalam penentuan harga atau karena ada ketimpangan harga. Dalam kondisi kezaliman tidak dapat lagi ditolak menurut ibn Taimiyah, pemerintah wajib melakukan *tas'ir* (menetapkan harga) atas dasar kepentingan masyarakat, karena tindakan yang dilakukan pedagang akan membawa kemudharatan yang lebih besar.⁷³

Sebagian ulama Malikiyah membolehkan *tas'ir* jika sebagian kecil pedagang di pasar sengaja menjual dengan harga sangat murah, sedang umumnya pedagang memasang harga lebih mahal. *Tas'ir* di bolehkan untuk menaikkan harga agar sesuai dengan harga umumnya

⁷³Rozalinda h.385.

pedagang. Mayoritas mazhab Maliki menyatakan pemerintah boleh (bahkan wajib) menetapkan harga jika terjadi kenaikan harga, meskipun persediaan barang mencukupi. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa dalam syariat Islam, pemerintah diberi wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan hukum penetapan harga (*Tas'ir*) diperbolehkan apabila bersifat adil bahkan dapat menjadi wajib jika memang benar-benar dibutuhkan demi kemaslahatan masyarakat.

3. Syarat-Syarat Penetapan Harga (*at-Tas'ir*)

Menurut para ulama fiqh, syarat-syarat *at-tas'ir al-jabari* adalah:⁷⁴

- 1) Komoditi atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak.
- 2) Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka.
- 3) Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.
- 4) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukkan para pakar ekonomi.
- 5) Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
- 6) Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang

⁷⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2007), h.145.

menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang. Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu.

- 7) Pemerintah perlu dilibatkan dalam penetapan harga yang tentunya masih berpihak pada kepentingan dan kemaslahatan bersama.

Penguasa diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Penguasa tidak boleh mengutamakan kemaslahatan pembeli dan mengesampingkan kemaslahatan penjual dengan mematok harga tertinggi. Penguasa juga tidak boleh mengutamakan kemaslahatan penjual dan mengabaikan kemaslahatan pembeli dengan menetapkan harga terendah. Ia juga tidak boleh melanggar kemaslahatan penjual dan pembeli dengan memaksa mereka untuk menjual beli dengan satu harga yang ia tetapkan. Untuk mengontrol harga, penguasa harus menjaga stabilitas keseimbangan penawaran dan permintaan.

4. Macam-Macam Tas'ir

Para ulama fiqih membagi *tas'ir* kepada dua macam, yaitu :

Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dengan harga yang berlaku secara alami ini,

tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang.

Kedua harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan at-tas'ir al-jabari.

Ada beberapa rumusan at-tas'ir al-jabari yang dikemukakan para ulama. Ulama Hambali mendefinisikan at-tas'ir al-jabari yaitu “upaya pemerintah dalam menetapkan suatu harga komoditi serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya”

Imam Ausyakani tokoh ushul fikih, mendefinisikan at-tas'ir yaitu, “Intruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.

Kedua definisi ini tidak membatasi komoditi apa saja yang harganya telah ditentukan pemerintah. Bahkan Ad-Duraini lebih memperluas cakupan at-tas'ir al-jabari. Sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. menurutnya, ketetapan pemerintah tidak hanya tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga manfaat dan jasa para pekerja yang diperlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga naik dengan harga tidak wajar.

Sesuai dengan kandungan definisi-definisi di atas, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Menurut ad-Duraini, apapun bentuk komoditi atau keperluan warga suatu negara, untuk kemaslahatan mereka, pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.⁷⁵

⁷⁵<http://irwanto.krc.blogspot.com/2015/04/at-tasir-l-jabari-penetapan-harga-oleh.html?m=1>, diakses pada tanggal 8 April 2019.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Tiyuh Gunung Agung

Pada jaman dahulu Tiyuh Gunung Agung terkenal dengan hasil pertanian kedelai, Padi, Karet, Jagung, Sawit Konon Tanah di Tiyuh Gunung Agung sangatlah subur, sehingga kehidupan masyarakat Tiyuhpun bisa dikatakan makmur.⁷⁶

Asal mula pemberian nama Tiyuh ini bemula dari musyawarah yang di lakukan para tokoh agama, yaitu Kyai Hi.Yusuf, Kyai Hi. Matayep, Kyai Setan Rajo Sekuren, Kyai Setan Guru Alam, dan Kyai Setan Rajo Sako dari kelima tokoh agama tersebut yang paling banyak di kenal masyarakat dan di segani sesama Kyai adalah Kyai Hi.Yusuf. dari musyawarah yang di lakukan tersebut di ambil kesepakatan bahwa Tiyuh ini di beri nama Tiyuh Gunung Agung.

Hal itu sebagai bentuk penghargaan pada Kyai Hi.Yusuf atas jasanya dalam memimpin dan membimbing masyarakat terutama dalam bidang agama.

Berikut adalah silsilah Kepemimpinan Tiyuh Gunung Agung sampai sekarang :

⁷⁶ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh (RPJM-Tiyuh) Tahun 2015 - 2020

Tabel 1. Silsilah Kepemimpinan Desa Gunung Agung

NO.	NAMA	PERIODE JABATAN
1.	Bakri	Tahun 1953-1961
2.	Sahidun	Tahun 1961-1969
3.	Muslimin	Tahun 1969-1971
4.	Setan Gedung	Tahun 1971-1979
5.	Balkimin	1979-2002
6.	Fatoni	2002-Sekarang

Sumber Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh (RPJM-TIYUH) Tahun 2015-2020.

2. Kondisi Geografis

Tiyuh Gunung Agung memiliki luas wilayah 1.633 ha dengan produktif 1.300 ha dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. Kondisi Geografis Desa Gunung Agung.

No	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	200 ha/m ²
2.	Luas persawahan	98 ha/m ²
3.	Luas perkebunan	1.025 ha/m ²
4.	Luas kubuan	1 ha/m ²
5.	Luas pekarangan	300 ha/m ²
6.	Luas taman	1 ha/m ²
7.	Perkantoran	2 ha/m ²
8.	Luas prasarana umum lainnya	6 ha/m ²

	Total Luas	1633 ha/m ²
--	-------------------	------------------------

Sumber Profil Desa Gunung Agung

Letak Tiyuh Gunung Agung berada di sebelah Barat Tiyuh Panaragan yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang Barat, jarak dari Tiyuh Gunung Agung ke Tiyuh Panaragan sekitar 70 km, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tiyuh Mulya Jaya, Tiyuh Suka Jaya, Kecamatan Gunung Agung.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Tiyuh Sido Agung Kecamatan Way Kenanga.
- c. Sebelah Selatan bebatasan dengan Tiyuh Setia Agung, Tiyuh Terang Bumi Agung Kecamatan Gunung Terang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tiyuh Marga Jaya Kecamatan Gunung Agung.

3. Kondisi Perekonomian

Jumlah penduduk Tiyuh Gunung Agung sebanyak 2.991 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 977 KK, dengan penduduk usia produktif 1.491 jiwa, sedangkan penduduk yang di kategorikan miskin 1020 jiwa. Mata pencahrian sebagian penduduk adalah Buruh sedangkan hasil produksi ekonomis Tiyuh yang menonjol adalah Perkebunan Karet.

Berikut merupakan jumlah penduduk Desa Gunung Agung ;

Tabel 3.Jumlah penduduk Desa Gunung Agung.

No.	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-laki	1.449 orang
2.	Jumlah Perempuan	1.542 orang
3.	Jumlah Total	2.991 orang
4.	Jumlah kepala keluarga	997 KK
5.	Jumlah RT	20 RT
6.	Jumlah RW	6 RW
7.	Kepadatan Penduduk	0,58 Per Km

Sumber : Data umum Tiyuh Gunung Agung

Tabel 4.Mata Pencarian Penduduk Tiyuh Gunung Agung

No.	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	400 orang	172 orang
2.	Buruh Tani	300 orang	80 orang
3.	Buruh migran Wanita	73 orang	-
4.	Buruh migran Laki-laki	-	23 orang
5.	Pegawai Negeri Sipil	3 orang	6 orang
6.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	2 orang	3 orang
7.	Pedagang keliling	-	2 orang
8.	Nelayan	101 orang	-
9.	Montir	5 orang	-
10.	Bidan Swasta	-	2 orang

11.	POLRI	1 orang	-
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1 orang	-
13.	Pengusaha kecil dan menengah	20 orang	10 orang
14.	Dukun Kampung Terlatih	-	1 orang
15.	Belum Bekerja	100 orang	33 orang
16.	Tidak Bekerja	53 orang	-
	JUMLAH PENDUDUK	1059 orang	332 orang

Sumber : Data umum Tiyuh Gunung Agung

4. Visi dan Misi Pembangunan Tiyuh

Visi pembangunan Tiyuh adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Tiyuh yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Tiyuh yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Tiyuh dengan melihat potensi dan kebutuhan Tiyuh. Penetapan visi pembangunan Tiyuh, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Tiyuh, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Tiyuh mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi pembangunan Tiyuh Gunung Agung Tahun 2015-2020 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Tiyuh yang

telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Tiyuh secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Mengingat bahwa Kepala Tiyuh terpilih dalam Pemilihan Kepala Tiyuh Tahun 2010 s/d Tahun 2014 belum menyusun RPJM-Tiyuh.

Maka Visi dan misi dalam RPJM-Tiyuh ini ditetapkan untuk Tahun 2015-2020, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Tiyuh Gunung Agung seperti Pemerintah Tiyuh, BPT, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat Tiyuh pada umumnya. Serta pertimbangan kondisi eksternal di Tiyuh seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Namun demikian dapat dimungkinkan apabila Kepala Tiyuh terpilih dalam Pemilihan Kepala Tiyuh yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2020 akan merubah Visi dan Misi yang disesuaikan dengan Visi dan Misi yang bersangkutan.

Visi pembangunan Tiyuh tahun 2015-2020 ini disusun dengan memperhatikan/ mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2016 (Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2013), yakni ***“Terwujudnya Kabupaten Tulang Bawang Barat yang lebih Sejahtera, Maju dan Amanah”***. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Tiyuh Gunung Agung Tahun 2015-2020 adalah:

“Terwujudnya Tiyuh Gunung Agung yang Mandiri dan Sejahtera”.

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Tiyuh yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun ke depan.

Mandiri adalah menciptakan suatu kondisi masyarakat yang senantiasa berpegang teguh pada kemampuan yang dimiliki. Karena di Tiyuh Gunung Agung sebagian besar penduduknya petani yang mengelola lahan perkebunannya sendiri maka sangat diharapkan semua tindakan yang dilakukan senantiasa dilandasi rasa percaya diri yang kuat serta didukung dengan pengetahuan yang memadai dan sesuai, sehingga akan terciptanya masyarakat yang mempunyai kapabilitas dan kemandirian yang tinggi dan kesejahteraan yang didasari oleh usaha yang mandiri. Ilmu pengetahuan yang dilengkapi dengan kemauan yang kuat untuk menghasilkan suatu kegiatan yang positif dapat mendorong perbaikan taraf kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Hal itu akan lebih baik lagi jika semua kegiatan yang positif yang didasari ilmu pengetahuan berasal dari masyarakat itu sendiri dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran tercapainya kehidupan yang mandiri adalah: Terciptanya suatu kumpulan masyarakat mandiri yang berkumpul untuk membagi ilmu antara

masyarakat satu dengan masyarakat yang lain dan berusaha menciptakan suatu kegiatan yang akan menghasilkan hasil yang bermanfaat dan positif bagi masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah Tiyuh Gunung Agung mengupayakan pembangunan yang difokuskan pada:

- a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kemandirian seperti: pembangunan gubuk-gubuk kreatif dan pengadaan alat-alat bantu serta modal untuk menunjang kegiatan mandiri.
- b. Pemanfaatan balai tiyuh sebagai tempat diskusi-diskusi ilmu dan pengalaman.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun social (spiritual), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas suberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Tiyuh yang berbasis pada potensi Tiyuh yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada layanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olahraga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Tiyuh.

Misi Pembangunan Tiyuh adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Tiyuh, sesuai visi pembangunan Tiyuh yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Tiyuh dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggara pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Tiyuh Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015-2020 dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat Tiyuh Gunung Agung yang Mandiri Misi:
 - 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - 2) Meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman masyarakat terhadap bidang usaha mandiri.
- b. Mewujudkan masyarakat Tiyuh Gunung Agung yang Sejahtera Misi:

1) Pembangunan

- a) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Tiyuh
- b) Meningkatkan sumber daya alam yang ada.
- c) Meningkatkan peran aktif BPT, LPMT, RT RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Tiyuh.
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Tiyuh.

2) Pemerintahan

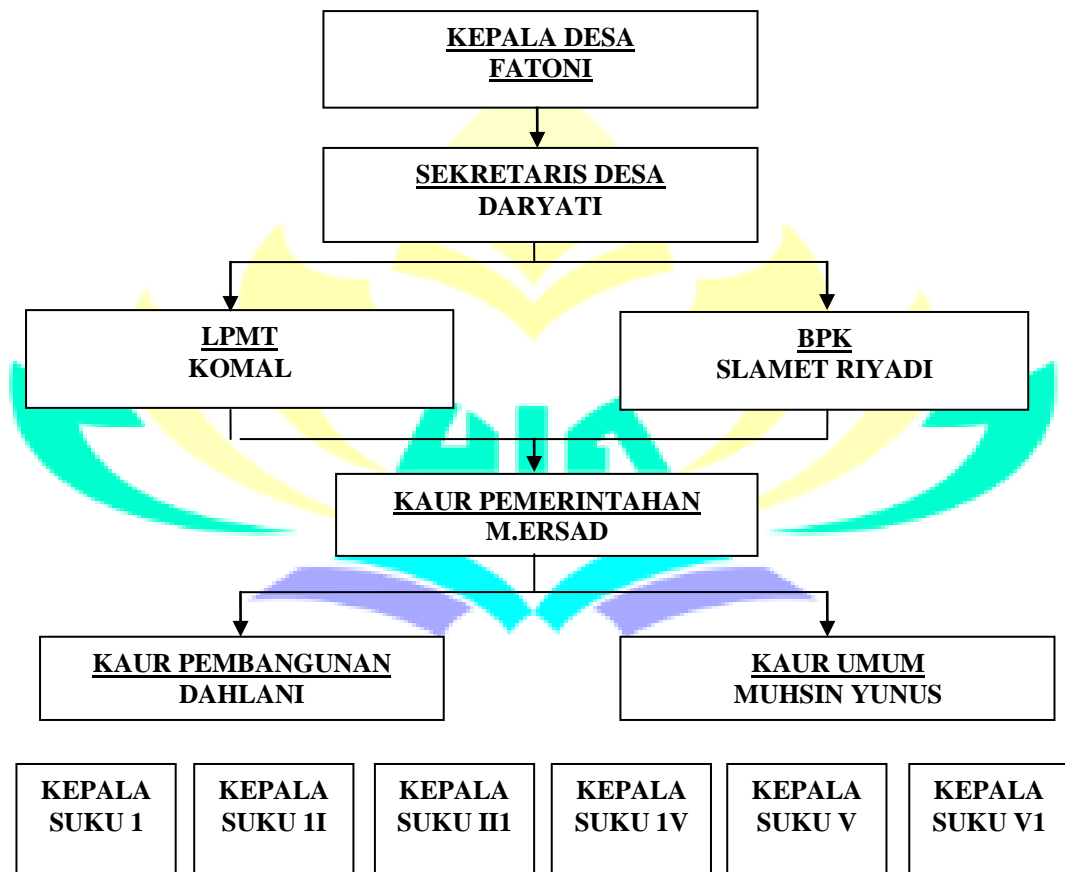
- a) Menciptakan sistem pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

3) Kemasyarakatan

- a) Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah.
- b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
- c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

5. Struktur Organisasi Pemerintah Tiyuh Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tabel 5. Struktur Oragnisasi Pemerintah Desa Gunung Agung.



6. Sejarah Singkat Pasar Desa Gunung Agung

Pasar Desa Gunung Agung merupakan pasar yang telah ada sejak lama yaitu berdiri pada Tahun 2010, yang terletak di Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, lebih tepat nya pasar tersebut terletak di tengah-tengah permukiman warga. Luas Tanah Pasar Desa Gunung agung adalah sekitar 600 M².

Pada awalnya Pasar Desa Gunung Agung terletak di tanah lapangan dengan bangunan non permanen. Pasar Desa Gunung Agung ini ada sejak masa pemerintahan Hj. Balkimin, di mana pada masa itu beliau memperluas kampung dan mulai membuka pasar yang dulu tanah tersebut di gunakan hanya untuk lapangan olahraga sepak bola. Pasar desa Gunung Agung telah mengalami perombakan pada Tahun 2016, pada masa itu yang menjadi lurah Desa Gunung Agung adalah Bapak Fatoni. Atas perintah beliau, warga Desa Gunung Agung bersama-sama membangun pasar tersebut dengan menjadikan pasar tersebut bangunan permanen dengan jumlah lapak 50 kios yang berukuran 5 x 5 m.

Ketika pasar Desa Gunung Agung selesai di bangun, dan di buka oleh kepala Desa Gunung Agung, bersamaan dengan dibukanya Pasar tersebut oleh bapak Fatoni selaku Kepala Desa Gunung Agung, beliau menyampaikan bahwasannya Bpk. Fatoni memberi kebijakan, beliau membangun lapak pasar tersebut untuk disewakan dengan tujuan agar dana hasil sewa menyewa lapak tersebut menjadi anggaran pendapatan asli Desa, di mana akan di gunakan untuk pembangunan Desa Gunung Agung termasuk Pasar Desa tersebut.⁷⁷

Dengan hal demikian maka lapak tersebut dapat digunakan oleh masyarakat mana pun baik dari luar desa maupun dalam desa. Akan tetapi walaupun begitu warga asli Desa Gunung Agung yang lebih di

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Daryati, Sekretaris Desa Gunung Agung Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat, tanggal 14 Maret 2019.

utamakan untuk berdagang di sana. Mengingat bahwa pasar tersebut dibangun dari hasil swadaya masyarakat Desa.

Untuk jam operasi, para pedagang yang berasal dari Desa Gunung Agung membuka lapak nya dari pukul lima pagi hingga pukul lima sore (05.00-17.00 WIB), sedangkan para pedagang yang berasal dari luar Desa Gunung Agung buka pukul setengah lima pagi hingga pukul empat sore (05.00-16.00 WIB).⁷⁸

7. Struktur Organisasi Pengelola Pasar Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tabel 6. Struktur Pengelola Pasar Desa Gunung Agung.



⁷⁸Wawancara dengan Ibu Rahayu, pedagang asli warga Desa Gunung Agung, Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat, tanggal 14 Maret 2019.

8. Unit dan Fasilitas Pasar Pasar Desa Gunung Agung .

Tabel 7. Unit dan Fasilitas Pasar Desa Gunung Agung.

NO.	URAIAN	BANYAKNYA
1.	Personil: 1) Petugas kebersihan 2) Petugas keamanan 3) Parkir	5 orang 3 orang 2 orang
2.	LAPAK: 1) Kios	80 Buah
3	FASILITAS: 1) Luas Tanah Pasar 2) Tempat Parkir 3) Masjid 4) Kamar mandi umum 5) WC Umum	2500 M ² 7 M 1 buah - 1 buah
4	PERALATAN KEBERSIHAN 1) Bak Container Sampah 2) Container 3) Kontak Sampah Buatan 4) Gerobak sampah 5) Truck Sampah 6) Truck Amroll	- - 8 4 1 -

Sumber: Dokumentasi Unit dan Fasilitas Pasar Desa Gunung Agung

B. Sistem sewa-menyewa lapak di Pasar Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sebelum penulis membahas lebih dalam mengenai sewa-menyewa lapak pasar di Desa Gunung Agung, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa sistem sewa-menyewa lapak yang akan dibahas saat ini, merupakan praktek sewa-menyewa yang terdapat perbedaan harga antara masyarakat asli desa dengan luar Desa Gunung Agung.

1) Pelaksanaan sewa-menyewa lapak di Desa Gunung Agung

Sewa-menyewa adalah salah satu bentuk usaha yang memberikan manfaat dari suatu benda dengan kompensasi atau syarat dan rukun yang telah terpenuhi, sehingga timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang biasa terjadi di dalam sewa-menyewa lapak Pasar Desa Gunung Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam rangka memenuhi dan menambah penghasilan mereka melakukan suatu transaksi pemanfaatan suatu tempat atau lapak yang digunakan sebagai tempat usaha untuk berdagang yaitu dengan melalui transaksi sewa-menyewa.

Praktik sewa-menyewa sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, sama halnya seperti praktik sewa-menyewa lapak suatu pasar. Setelah terjadinya akad sewa, maka timbullah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dimana hak dan kewajiban masing-masing pihak itu harus dilaksanakan dan dipenuhi. Hak itu sendiri merupakan segala sesuatu yang menjadi milik dan penggunaannya tergantung pada kita, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Maka baik dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan masing-masing harus memberikan hak dan melaksanakan kewajiban dengan rasa tanggung jawab sebagai akibat hukum dari transaksi sewa-menyewa tersebut.

Sewa-menyewa lapak pasar Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang biasanya lama sewa tersebut adalah 1 tahun, dengan

harga sewa yang berbeda sesuai dengan domisili atau tempat tinggal masyarakat yang ingin menyewa lapak pasar di Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat.⁷⁹

Pasar Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat sekarang sudah terbilang cukup ramai, oleh karena itu banyak masyarakat yang berdagang di sana baik itu masyarakat dari desa Gunung Agung maupun masyarakat di luar Desa Gunung Agung. Melihat kondisi pasar di Desa Gunung Agung yang terbilang cukup ramai dan bisa menjadi pusat perdagangan yang maju banyak masyarakat yang tertarik untuk memulai bisnisnya di pasar Desa Gunung Agung tersebut.

Dalam hal ini pihak yang ingin menyewa lapak pasar di Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat harus menunjukkan identitas kependudukan atau sering disebut dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini dilakukan karena merupakan syarat mutlak bagi siapapun pihak yang menyewa lapak pasar di Desa Gunung Agung dan syarat tersebut berlaku bagi semua masyarakat yang ingin menyewa lapak pasar di sana.⁸⁰

Kemudian dalam tahap transaksi sewa-menyewa dilakukan setelah menunjukkan Kartu Tanda Identitas Penduduk oleh calon penyewa lapak pasar. Kemudian setelah itu tahap transaksi selanjutnya yaitu tahap penawaran. Tahap transaksi ini dilakukan untuk penetapan

⁷⁹Wawancara dengan Ibu Daryati (Sekretaris

⁸⁰Wawancara dengan Bapak Muhcsin (Bendahara Pasar), tanggal 14 Maret 2019.

harga sewa. Kemudian dilakukan ijab qabul setelah adanya kesepakatan antara pihak yang menyewakan dan penyewa. Dalam hal ini diikuti dengan kesepakatan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban setelah proses akad hingga sewa-menyewa berakhir.⁸¹

Sewa-menyewa lapak di Pasar Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang, setelah kedua belah pihak bertemu dan mengadakan penawaran, oleh karena itu tahap selanjutnya adalah tahap transaksi. Tahapan ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1) Penetapan Harga

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muchsin Yunus selaku bendahara Desa sekaligus bendahara dari pasar tersebut, proses tawar-menawar antara kedua belah pihak antara penyewa lapak dilakukan terlebih dahulu, kemudian barulah tahap selanjutnya dilakukan penetapan harga. Dalam praktiknya, dalam menetapkan harga suatu lapak pasar biasanya berdasarkan posisi letak, ukuran, fasilitas, keadaan bangunan lapak pasar. Untuk hal tersebut semua ukuran, fasilitas, keadaan bangunan lapak pasar di Desa Gunung Agung sama saja, yaitu masing-masing lapak berukuran 5x5. Namun ada suatu syarat yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pihak penyewa wajib menunjukkan Kartu Identitas Penduduk.

Penyewa yang menyewa lapak pasar biasanya menetapkan tanggal pembayaran sesuai dengan kesepakatan keduanya seperti

⁸¹*Ibid* .

pembayaan di awal atau akhir tahun, namun biasanya di awal tahun. Dalam pelaksanaan sewa-menyewa lapak pasar ini dengan sistem kontrak, dan pada awal akad sudah disebutkan dengan jelas apa saja hak dan kewajiban antara keduanya.⁸²

2) *Ijab* dan *qabul* sewa-menyewa

Cara pelaksanaan sewa-menyewa lapak pasar tidak jauh berbeda dengan sewa-menyewa pada umumnya. *Ijab* dan *qabul* dilakukan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. *Ijab* dan *qabul* disampaikan setelah terjadinya kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Dalam sewa menyewa lapak ini di catat sendiri oleh masing-masing pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan, transaksi sewa-menyewa ini dilaksanakan secara tidak formal yang membutuhkan kwitansi serta tanda tangan kedua belah pihak di atas materai. Akan tetapi ada baiknya kalau ada kwitansi pembayaran agar di lain waktu ketika ada suatu permasalahan ada bukti yang cukup menguatkan.⁸³

3) Hak dan Kewajiban sewa-menyewa

Adapun hak dan Kewajiban sewa-menyewa lapak pasar antara lain:

- a) Pihak yang menyewakan berhak menerima harga sewa atau imbalan atas yang disewakan pada saat waktu terjadinya shigat.

⁸²Wawancara dengan Bpk Muhcsin Yunus (orang yang menyewakan), tanggal 14 Maret 2019.

⁸³Wawancara dengan Ibu Sulas (orang yang menyewa), Tanggal 15 Maret 2019

- b) Perawatan objek sewa dibebankan kepada pihak yang menyewakan lapak pasar.
- c) Setelah terjadi kesepakatan bersama, maka pihak yang menyewakan tidak berhak menarik kembali lapak pasar yang disewakan. Begitu juga dengan pihak penyewa tidak boleh menarik kembali uang sewanya.
- d) Bila terjadi bencana/kerugian yang disebabkan oleh kelalaian sendiri dari pihak penyewa maka menjadi tanggung jawab penyewa.⁸⁴

Sewa menyewa lapak batal atau berakhir disebabkan berakhirnya atau habisnya masa sewa yang telah diperjanjikan kedua belah pihak. Dan apabila terjadi hal-hal di luar dugaan kedua belah pihak, seperti bencana yang mengakibatkan rusaknya bangunan lapak, kematian, dan lain sebagainya, hal tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya sewa-menyewa lapak pasar tersebut.

Berikut ini adalah beberapa pelaku sewa-menyewa lapak pasar yang ada di Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat:

a. Pihak yang menyewakan

1) Bapak Fatoni

Selaku kepala Desa yang berhak memberikan kebijakan atas daerah nya salah satu kebijakannya yaitu untuk melakukan sistem sewa lapak pasar yang sudah berjalan 3 tahun. Bapak Fatoni

⁸⁴Wawancara dengan Ibu Daryati (Pihak yang menyewakan), Tanggal 14 Maret 2019

memberlakukan sistem sewa lapak pasar serta memberikan harga sewa lapak yang berbeda dengan penduduk asli Desa Gunung Agung dan bukan penduduk asli Desa Gunung Agung. Motivasi awal bapak Fatoni membangun serta memberlakukan sistem sewa lapak pasar tersebut dengan harga yang berbeda yaitu pertama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Desa Gunung Agung.⁸⁵

2) Bapak Muhcsin Yunus

Selaku bendahara yang menangani masyarakat yang ingin menyewa lapak. Beliau menyewakan lapak pasar dengan harga yang berbeda berdasarkan domisili, dengan harga sekitar 5,5 juta per tahun untuk penduduk asli Desa, dan 6 juta per tahun untuk bukan warga asli Desa Gunung Agung. Dalam pelaksanaan sewa menyewa lapak pasar dengan sistem kontrak, tidak ada perjanjian apapun secara tertulis akan tetapi pada awal akad sudah disebutkan secara jelas apa saja hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.⁸⁶ Motivasi menyewakan lapak pasar dengan harga berbeda sama seperti yang dikatakan Bapak Fatoni selaku Kepala Desa yaitu terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Desa Gunung Agung, tambahanya bahwa uang hasil dari sewa menyewa tersebut dapat digunakan untuk menambah uang pembangunan Desa serta untuk biaya operasional pasar itu sendiri.

⁸⁵Wawancara dengan bapak Fatoni tanggal 14 Maret 2019.

⁸⁶Wawancara dengan bapak Muhcsin Yunus, tanggal 14 Maret 2019.

3) Ibu Daryati

Ibu daryati selaku sekretaris Desa yang ikut dalam kebijakan kepala desa beliau mengatakan sewa menyewa yang diberlakukan untuk lapak pasar dan dengan harga yang berbeda karena ingin menambah pendapatan asli Desa Gunung Agung, dan hasil dari transaksi sewa menyewa lapak tersebut akan digunakan untuk operasional pasar desa itu sendiri. Tambahnya beliau mengatakan bahwa lapak pasar tersebut jika kita hanya memperuntutkan untuk warga asli Desa maka lapak tersebut pastilah banyak yang kosong.

b. Pihak yang Menyewa

1) Penyewa dari Warga Asli Desa Gunung Agung

a) Ibu Neti

Ibu Neti merupakan salah satu pedagang dari warga asli Desa Gunung Agung yang menyewa lapak pasar di desanya. Ibu Neti sudah hampir 3 tahun berdagang baju di kios yang disewanya tersebut. Ibu Neti menyewa lapak tersebut seharga 5,5 juta/tahunnya. Motivasi ibu Neti memilih berdagang dan menyewa lapak pasar tersebut adalah ingin menambah penghasilan dan jarak pasar dari rumahnya juga dekat sehingga beliau tertarik untuk memulai bisnis di pasar tersebut. Terkait dengan adanya warga luar Desa Gunung Agung yang berdagang juga di pasar tersebut Ibu

Neti mengatakan tidak menjadi masalah sebab kita sama-sama menyewa.⁸⁷

b) Bapak Nasril

Bapak Nasril merupakan salah satu pedagang warga asli Desa Gunung Agung yang menyewa lapak pasar di desanya juga. Bapak Nasril merupakan pedagang sembako di pasar tersebut. Beliau mulai berdagang dan menyewa lapak pasar tersebut sudah sekitar 2 tahun dengan harga lapak sama seperti Ibu Neti Sebelum nya yaitu 5,5 juta/tahunnya. Motivasi bapak Nasril menyewa lapak dan berdagang di sana adalah untuk menambah penghasilan serta memanfaatkan fasilitas yang sudah di sediakan Desa. Terkait dengan adanya penduduk luar Desa Gunung Agung yang menyewa lapak untuk berdagang di sana, bapak Nasril tidak merasa keberatan malah justru akan meramaikan pasar desa tersebut.⁸⁸

c) Ibu Rina

Ibu Rina juga merupakan salah satu pedagang dari penduduk asli Desa Gunung Agung, beliau merupakan salah satu pedagang sayuran yang sudah lama berdagang di pasar Desa tersebut sebelum pasar tersebut di rombak pada tahun 2016. Dengan ada nya kebijakan dari kepala desa untuk memberlakukan adanya sewa menyewa lapak di pasar tersebut beliau merasa tidak keberatan untuk membayar sewa lapak tersebut dan menyanggupi nya. Di karenakan beliau memiliki

⁸⁷Wawancara dengan ibu Neti, tanggal 15 Maret 2019

⁸⁸Wawancara dengan Bapak Nasril, tanggal 15 Maret 2019.

banyak tanggungan, dan beliau juga sudah ditinggalkan oleh suaminya maka Ibu Rina memberanikan diri untuk menego harga dari lapak pasar tersebut agar tetap bisa berdagang. Dengan adanya kebijakan pemerintah desa maka ibu Rina membayar harga sewa tersebut dengan harga 4 juta/tahun. Terkait dengan adanya pedagang yang berasal dari luar Desa beliau mengatakan tidak menjadi masalah malah justru akan menambah pendapatan asli Desa, ibu Rina mengatakan juga mereka tidak merasa tersaingi sebab rezeki sudah diatur oleh Allah SWT.⁸⁹

2) Penyewa dari warga luar Desa Gunung Agung

a) Ibu Sulas

Ibu sulas merupakan salah satu pedagang yang berasal dari Desa Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ibu sulas mulai menyewa lapak pasar di Desa Gunung Agung sudah sekitar 2 tahun lamanya. Beliau menyewa lapak seharga 6 juta/tahunnya. Motivasi beliau berdagang di pasar desa Gunung Agung adalah untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Terkait dengan adanya perbedaan harga dalam biaya sewa lapak antara penduduk asli desa Gunung Agung dengan penduduk warga luar desa, beliau

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Rina, tanggal 15 Maret 2019.

sudah mengetahui kebijakan adanya perbedaan harga tersebut dan merasa tidak keberatan.⁹⁰

b) Bapak Heru

Bapak Heru merupakan salah satu pedagang yang berasal dari Desa Keagungan Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bapak Heru juga merupakan warga luar Desa Gunung Agung yang berdagang alat-alat elektronik di pasar tersebut dan beliau menyewa lapak tersebut seharga 6 juta/tahun. Bapak Heru tertarik memulai bisnis di pasar tersebut dikarenakan pasar tersebut sudah menjadi pusat perdagangan yang terbilang cukup ramai untuk lingkup Desa. Motivasi beliau berdagang di sana untuk menambah penghasilan serta mebiayai hidup anak istrinya. Terkait dengan adanya perbedaan harga sewa lapak antara penduduk asli desa gunung agung dan dengan penduduk luar bapak Heru menyanggupinya, walaupun sedikit kurang berkenan di hati bapak Heru, walaupun demikian Bapak Heru memaklumi nya sebab itu merupakan kebijakan aparaturnya pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa serta menghindari adanya kesenjangan social antara masyarakat asli Desa Gunung Agung.⁹¹

3) Ibu Santi

Ibu santi yaitu salah satu pedagang yang berasal dari Desa Terang Bumi Agung, ibu Santi merupakan pedagang beras di Pasar

⁹⁰Wawancara dengan Ibu Sulas, tanggal 15 Maret 2019.

⁹¹Wawancara dengan Bapak Heru, tanggal 15 Maret 2019.

Desa Gunung Agung, yang sudah memulai bisnisnya dari tahun 2016. Dengan menemui bapak Muhsin Yunus, Ibu Santi menyewa lapak tersebut dengan kesepakatan harga 6 juta yang akan dibayar setiap tahunnya. Motivasi Ibu Santi berdagang di Desa Gunung Agung yaitu untuk menambah penghasilan serta membantu suaminya juga yang berdagang beras juga di warung rumahnya. Adanya perbedaan harga sewa lapak antara warga asli desa dengan warga luar Desa Gunung Agung Ibu Santi beranggapan agak kurang berkenan, tapi apa boleh buat kita sebagai pedagang yang ingin berbisnis di sini harus mengikuti peraturan. Dalam pelaksanaan sewa menyewa juga akan lebih baik ada kwitansi. Untuk sejauh ini ibu Santi sepakat saja dengan adanya perbedaan harga sewa lapak tersebut, sebab itu merupakan kebijakan dari aparat Desa untuk kepentingan warga nya.⁹²

2. Penetapan Harga Dalam Sewa Menyewa lapak di Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat

Penetapan harga merupakan ketentuan harga yang ditentukan oleh pihak-pihak yang berhak menentukan harga tersebut dalam hal ini adalah aparat Desa. Penetapan harga dalam sewa-menyewa lapak di Pasar Desa Gunung Agung berbeda tergantung dengan domisili atau tempat tinggal calon penyewa lapak pasar.

⁹²Wawancara dengan Ibu Santi, tanggal 15 maret 2019.

Adanya perbedaan harga tersebut didasarkan pada kebijakan pemerintah Desa Gunung Agung. Kebijakan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan antara masyarakat Desa Gunung Agung dan aparat desa. Pemerintah Desa dalam menetapkan harga lapak pasar telah berdiskusi bersama dengan berbagai pihak, agar mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Berdasarkan hasil diskusi tersebut memperoleh kesimpulan bahwa harga lapak tersebut akan dibedakan dengan penduduk asli Desa Gunung Agung, yaitu harga untuk penduduk asli desa Gunung Agung Rp.5.500.000,- / Tahun dan untuk penduduk luar Desa Gunung Agung Rp.6.000.000,- / Tahun. Selanjutnya Kepala Desa mengerahkan pasukan yang ditunjuknya untuk mengorganisir jalannya bisnis sewa-menyewa lapak pasar di Desa Gunung Agung.

Yang menjadi acuan kepala Desa dalam menetapkan harga lapak pasar sehingga menimbulkan perbedaan harga tersebut adalah kemaslahatan masyarakat serta berdasarkan visi dan misi pembangunan Desa Gunung Agung.⁹³ Di mana Visi dan misi pembangunan Desa Tahun 2015-2020 adalah “Terwujudnya Tiyuh Gunung Agung yang Mandiri dan Sejahtera”.

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat di perlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan

⁹³ Wawancara dengan Bapak Fatoni, Tanggal 14 Maret 2019

(stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

Mandiri dalam hal ini menciptakan suatu kondisi masyarakat yang senantiasa berpegang teguh pada kemampuan yang dimiliki. Diharapkan semua tindakan yang dilakukan senantiasa dilandasi adanya rasa percaya diri yang kuat serta didukung dengan pengetahuan yang memadai dan sesuai, sehingga akan terciptanya masyarakat yang mempunyai kapabilitas dan kemandirian yang tinggi dan kesadaran yang tinggi dan didasari oleh usaha yang mandiri untuk bersama-sama membangun Desa, dengan begitu semua kegiatan yang positif berasal dari masyarakat itu sendiri dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri, serta hasilnya untuk masyarakat itu sendiri.⁹⁴

Sejahtera merupakan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual), dengan kata lain kebutuhan masyarakat telah terpenuhi secara batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desa berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing. Dalam hal ini yang menjadi acuan adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan Desa. Dalam hal ini

⁹⁴*Ibid.*, Tanggal 14 maret 2019.

mewujudkan masyarakat Desa Gunung Agung yang sejahtera melalui peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa bersama-sama, yang bertujuan untuk, meningkatkan usaha kecil dan menengah. Dengan adanya Pasar Desa yang disediakan diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat Desa untuk memulai bisnis di tempat yang telah disediakan, tidak hanya menitik beratkan pekerjaan sebagai petani saja.⁹⁵

Dalam penetapan harga lapak pasar yang menimbulkan perbedaan harga antara masyarakat Desa Gunung Agung dan masyarakat luar Desa hal tersebut merupakan suatu kebijakan aparatur Desa dengan mempertimbangkan kepentingan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, tingkat pembangunan Desa serta kemaslahatan masyarakat yang sudah berperan aktif dalam pembangunan Desa.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan di desa Gunung Agung seperti :

- a. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat
- b. Rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah.
- c. Akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin.
- d. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang.

⁹⁵*Ibid.*, 14 Maret 2019.

- e. Pengalaman nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis.
- f. Ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud.
- g. Pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.⁹⁶

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat di laksanakan sesuai dengan arah kebijakan maka perlu di perhatikan bahwa pada hakekatnya perbedaan harga lapak pasar tersebut merupakan perwujudan pemerintah Desa untuk di kelola dalam rangka mencapai tujuan, maka anggaran dari hasil sewa-menyewa lapak pasar Desa Gunung Agung tersebut digunakan untuk pembangunan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Gunung Agung.⁹⁷

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dari masyarakat Desa saling berkerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembagunan Desa. Formulasi kebijakan penetapan harga yang berbeda terhadap sewa-menyewa lapak pasar Desa Gunung Agung tersebut diarahkan pada program strategis pembangunan Desa Gunung Agung, di mana pada level kebijakan

⁹⁶Wawancara dengan Ibu Daryati, tanggal 14 Maret 2019.

⁹⁷Wawancara dengan bapak Fatoni, tanggal 14 Maret 2019.

anggaran untuk Pasar Desa tersebut yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta meningkatkan pendapatan asli Desa yang akan berdampak pada penyelesaian sedikit demi sedikit masalah-masalah yang ada di Desa Gunung Agung.



BAB IV ANALISIS DATA

A. Perbedaan Harga Sewa Lapak di Pasar Unyil Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat

Berdasarkan data yang diperoleh pada lapangan, Pasar Unyil ini merupakan salah satu pasar desa yang berada di tengah lingkungan masyarakat Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pasar ini berdiri pada tanah ulayat Desa Gunung Agung dan dibangun oleh masyarakat desa serta dikelola oleh aparat Desa Gunung Agung. Telah diketahui bahwasannya pasar ini dibangun dengan menggunakan dana desa. Dalam hal ini dana desa sudah sebagaimana mestinya diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang memiliki tujuan untuk mengantaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Masyarakat, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Mengenai adanya perbedaan harga dalam sewa lapak di pasar Unyil Desa Gunung Agung akan dianalisis secara objektif dan sistematis. Dalam pelaksanaan sewa lapak di pasar Desa Gunung Agung terdapat perbedaan harga sewa antara penyewa dari warga asli desa dan warga yang bukan penduduk asli desa gunung agung. Harga pembayaran sewa untuk warga asli desa Rp. 5.500.000,- pertahunnya dan harga sewa untuk bukan warga asli desa Rp. 6.000.000,- .

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penetapan harga dalam sewa-menyewa lapak di Pasar Desa Gunung Agung yaitu:

1. Pihak yang menyewakan lapak pasar menetapkan harga, berdasarkan domisili atau tempat tinggal pihak penyewa.
2. Penyewa lapak di Pasar Desa Gunung Agung harus menyepakati harga yang sudah disesuaikan oleh pihak administrasi dari pasar tersebut.
3. Pihak yang menyewakan lapak di pasar Desa Gunung Agung dalam menetapkan harga tidak ada masalah dan disetujui oleh masyarakat Desa Gunung Agung.
4. Pihak yang menyewakan lapak pasar Desa Gunung Agung dalam menetapkan harga antara warga Desa Gunung Agung dan bukan warga Desa Gunung Agung merupakan hasil musyawarah antara aparat Desa yang mengeluarkan kebijakan dan masyarakat menyetujuinya.

Perbedaan harga ini diberlakukan untuk warga yang bukan berdomisili di Desa Gunung Agung, hal ini dikarenakan:

- a. Pasar tersebut dibangun oleh swadaya masyarakat Desa.
- b. Untuk kemaslahatan masyarakat desa.
- c. Untuk peruntungan Desa.
- d. Untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Gunung salah satunya pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat. Maka diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Perbedaan harga dalam sewa lapak ini, tidak diberlakukan untuk warga Desa Gunung Agung. Menurut keterangan para penyewa yang berasal dari warga luar Desa Gunung Agung adanya perbedaan harga dalam sewa lapak pasar di Desa Gunung Agung, penyewa tidak pernah mengklaim, para

penyewa tidak mempermasalahkan selisih harga yang terjadi dalam perbedaan harga tersebut, karena perbedaan harga tersebut dilakukan atas dasar kebijakan pemerintah desa.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Sewa Lapak di Pasar Unyil Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dalam hukum Islam sewa-menyewa disebut dengan *Ijarah*. Sedangkan menurut istilah, sewa (*Al-Ijarah*) adalah menyerahkan (memberikan) manfaat dengan jalan penggantian. Sistem sewa-menyewa yang terjadi di Desa Gunung Agung ada perbedaan dalam menetapkan harga sewa lapak antara penduduk asli desa dengan penduduk luar desa.

Perihal perbedaan harga dalam sewa-menyewa pada dasarnya tidak diterangkan secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qu'ran dan hadis yang menyebutkan hukum dari perbedaan harga dalam sewa-menyewa. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan bermu'amalah adalah boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: hukum asal menetapkan syarat dari mu'amalah adalah halal dan di perbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.⁹⁸

⁹⁸<https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>

Dalam hal ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu jenis kegiatan muamalah, maka muamalah itu dibolehkan (*mubah*). Kaitannya dengan *habl min an-nas* (muamalah), pelaksanaannya diserahkan kepada manusia sesuai kondisi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dari kadah fiqh di atas, hukum perbedaan harga dalam sewa-menyewa adalah boleh (*mubah*), sebab belum ada dalil yang melarangnya. Selain dari pada kaidah fiqh tersebut, kita tarik salah satu dasar hukum dalam sewa menyewa, yaitu Q.S. Az-zukhruf:32.

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”⁹⁹

Jelas dari ayat di atas secara umum memberikan gambaran tentang kebolehan dalam sewa-menyewa, tafsir ayat di atas menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin dalam hal harta yang mereka miliki beserta segala fasilitasnya termasuk juga derajat mereka yang berbeda, semua itu merupakan ketentuan (takdir) Allah agar mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Di sinilah berlaku

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro., 2010), h.70.

penjualan jasa kepada orang yang membutuhkannya, karena seseorang tidak akan bisa melakukan segala sesuatunya tanpa jasa atau layanan orang lain. Orang kaya tidak mungkin dapat membangun rumahnya sendiri tanpa jasa para tukang dan kuli bangunan, mereka tidak mungkin mampu memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain meskipun mereka mempunyai banyak uang. Jadi apapun bentuk sewa-menyewa dibolehkan (mubah) asalkan terpenuhi rukun syaratnya.

Perbedaan harga yang terjadi dalam sewa-menyewa lapak di Pasar Unyil merupakan harga sewa yang diatur oleh aparat desa. Namun perbedaan harga dalam sewa-menyewa sebenarnya tidak diperkenankan yaitu hanya saja karena alasan domisili atau tempat tinggal dari pihak yang menyewakan. Domisili atau tempat tinggal para penyewa lapak pasar menjadikan adanya perbedaan harga dalam sewa-menyewa lapak di pasar Desa Gunung Agung. Pada dasarnya seorang muslim berhak diperlakukan adil. Hal ini sebagaimana ditegaskan seperti dalam kaidah ini:

الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمُعَامَلَاتِ وَ مَنْعُ الظُّلْمِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرَفَيْنِ وَرَفْعُ
الضَّرَرِ عَنْهُمَا

Artinya: “asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan”¹⁰⁰

¹⁰⁰<https://yufidia.com/kaidah-asal-setiap-muamalah-adalah-adil-dan-larangan-berbuat-zalim/> Ensiklopedia Islam-Kaidah: Asal Setiap Muammalah adalah adil dan larangan berbuat zalim

Kaidah di atas berlaku pada muamalah dan selainnya, bahkan juga dalam masalah i'tikad. Pada asalnya, dalam seluruh akad transaksi harus adil, dan demikianlah yang diajarkan syariat Islam.

Sudah menjadi kesepakatan semua syariat Allah untuk mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu. Allah mengutus para Rasul-Nya dengan membawa kitab-kitab suci dan neraca keadilan, agar manusia menegakkan keadilan pada hak-hak Allah dan makhluk-Nya.

Berdasarkan kaidah di atas yang menekankan pada keadilan, yang di dalamnya ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Walaupun adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang bertransaksi, di mana kerelaan merupakan suatu hal yang tersembunyi di dalam hati, oleh karenanya kerelaan tersebut dapat terlihat saat shigat dilakukan. Ijab dan qabul, atau apapun itu yang dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang dapat ditujukan sebagai bentuk kerelaan. Perbedaan harga dalam sewa lapak pasar Unyil ini diperbolehkan (*mubah*).

Perbedaan harga yang terjadi di dalam sewa lapak Pasar Unyil Desa Gunung Agung tidak mengandung unsur kezaliman dan ketidakadilan, sebab dengan adanya kejelasan mengenai harga dan objek yang disewa serta kerelaan dari kedua belah pihak penyewa dan yang menyewakan, dan hal ini juga didasarkan pada keterangan pihak penyewa yang tidak menklaim dalam menyewa lapak pasar di desa tersebut karena mereka menyadari

bahwasannya perbedaan harga tersebut merupakan suatu kebijakan dari aparaturnya. Maka hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang berbunyi:

مِنْكُمْ أَلَا مَرْوَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا

Artinya: “Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antaramu” (An-Nisa’: 59)

Dalam kasus perbedaan harga sewalapak di pasar Unyil Desa Gunung Agung merupakan suatu kebijakan dari pemerintah desa, harga yang ditentukan ini berdasarkan domisili atau tempat tinggal pihak penyewa yang berlaku di Kartu Tanda Penduduk nya. Aparatur Desa dalam menetapkan harga lapak pasar tersebut melihat dari sisi kemaslahatan masyarakat di desa nya. Di mana faktor dari perbedaan harga tersebut di antaranya yaitu;

- a. Pasar tersebut dibangun oleh swadaya masyarakat Desa.
- b. Untuk kemaslahatan masyarakat desa.
- c. Untuk peruntungan Desa.
- d. Untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Gunung salah satunya pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat. Maka diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka sesuai dengan visi dan misi dari Desa Gunung Agung untuk menjadikan desa nya sejahtera serta mandiri, maka perlu suatu pergerakan dari masyarakat dan pejabat desa untuk membangun bersama-sama desa tersebut. Perbedaan harga sewa-menewa lapak yang terjadi di Pasar Desa Gunung Agung dengan melihat

berdasarkan domisili atau tempat tinggal pihak penyewa telah sesuai dengan prinsip-prinsip penetapan harga dalam Islam atau *At-Ta'sir* dan mekanisme sewa-menyewa menurut tinjauan hukum Islam.

Di dalam Islam penetapan harga oleh pemerintah disebut *At-Ta'sir* yang artinya pemerintah sebagai penguasa berhak mengeluarkan kebijakannya melalui penetapan harga di mana kebijakan tersebut mengandung kemaslahatan pada masyarakat yang akan bermuara pada maqasid syariah atau tujuan akhir ilmu fiqh adalah mencapai keridhoan Allah SWT dengan melaksanakan syariahnya di muka bumi ini, sebagai pedoman hidup individual, berkeluarga, maupun hidup bermasyarakat.

Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penetapan harga menitikberatkan pada prinsip maqasid syariah yaitu dilihat dari suatu akad dan transaksi yang dilakukan untuk mencapai keridhoan Allah SWT sebagai sarana serta pedoman hidup untuk kepentingan manusia yang menarik adanya manfaat dan menjauhkan tindakan yang zalim dimana konsep *maqashid al-syari'ah* atau *al-tasyri'* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.¹⁰¹

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah hukum *tas'ir*. Jumhur ulama dari ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, seperti Ibnu Qudamah, ulama *muta'akhirin* seperti Imam Syaukani dan Imam An-

¹⁰¹Yubsir, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Al Adalah*, Vol. 9 No.2 2013, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2013), h 242. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/php/adalah/article/view/265>. (27 Maret 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Nabhani mengharamkan secara mutlak penetapan harga oleh pemerintah (*tas'ir*).¹⁰² Mereka mendasarkan ini pada QS An-Nisa (4: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Menurut jumhur ulama, *tas'ir* bertentangan dengan nash-nash yang terdapat dalam Al-Qu'ran dan Hadis. Sebab, *tas'ir* bermakna pemaksaan atas penjual dan atau pembeli untuk menjual-beli dengan harga tertentu. Ini melanggar kepemilikan seseorang karena kepemilikan itu bermakna memiliki kekuasaan atas harta miliknya. Karena itu, ia berhak menjual dengan harga yang ia sukai. Pematokan harga tentu akan menghalangi atau merampas sebagian kekuasaan seseorang atas hartanya. Sesuai keterangan nash di atas, hal itu tidak boleh terjadi.¹⁰³

Intervensi harga oleh pemerintah ini dilakukan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakatnya, serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

Adapun di kalangan ulama Hanafiyah dan sebagian besar ulama mazhab Hanbali abad petengahan Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziah

¹⁰² Rozalinda, *Op.Cit.*, 382.

¹⁰³ Rozalinda, *Ibid.*, h.383.

membedakan antara penetapan harga yang bersifat zalim dan yang adil.¹⁰⁴

Menurut mereka, penetapan harga yang bersifat zalim hukumnya dilarang. Sedangkan yang bersifat adil hukumnya dibolehkan, bahkan menjadi wajib jika memang diperlukan.

Penetapan harga yang dilakukan untuk melindungi seluruh kepentingan masyarakatnya, dalam hal ini agar tercipta keadilan bersama dan meningkatkan kesejahteraan Desa Gunung Agung. Hal ini telah sesuai dan memenuhi syarat yang penetapan harga oleh hukum Islam yang bersifat adil. Penguasa diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut perihal perbedaan harga yang terjadi dalam sewa-menyewa lapak di Pasar Desa Gunung Agung telah sesuai dengan penetapan harga yaitu sesuai dengan konsep penetapan harga oleh pemerintah yang adil dalam Islam, sehingga hukumnya diperbolehkan (*Mubah*).

¹⁰⁴ Rozalinda, Op.Cit. hlm 384.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi ini yaitu “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Sewa Lapak Pasar (Study di Pasar Unyil Desa Gunung Agung, Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat), maka dapat disimpulkan:

1. Dalam kasus perbedaan harga sewalapak di pasar Unyil Desa Gunung Agung merupakan suatu kebijakan dari pemerintah desa, harga yang ditentukan ini berdasarkan domisili atau tempat tinggal pihak penyewa yang berlaku di Kartu Tanda Penduduk nya. Aparatur Desa dalam menetapkan harga lapak pasar tersebut melihat dari sisi kemaslahatan masyarakat di desa nya. Di mana faktor dari perbedaan harga tersebut di antaranya yaitu;
 - a. Pasar tersebut dibangun oleh swadaya masyarakat Desa.
 - b. Untuk kemaslahatan masyarakat desa.
 - c. Untuk peruntungan Desa.
 - d. Untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Gunung salah satunya pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat. Maka diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

2. Penetapan harga lapak di pasar Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat ditinjau dari hukum Islam adalah diperbolehkan karena sesuai dengan ketentuan syara' dan banyak mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakat.

B. Saran

Mengenai praktek sewa lapak pasar di Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang seharusnya tertib administrasi dalam melaksanakan sewa lapak pasar seperti menyediakan kwitansi untuk diberikan kepada para pihak penyewa. Kwitansi tersebut ditandatangani kedua belah pihak bila perlu juga bermaterai.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, A. (2007). *Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A.Karim, A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Tahyyar, A. b.-M.-M. (2017). *Ensiklopedi Fiqh Muamalah: Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Agama, D. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV.Diponegoro.
- Ahmad, M. (2001). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- An-Nabhani, T. (1996). *Membangun System Ekonomi Alternative Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gustu.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- DSN-MUI, F. (2000). *Fatwa DSN-MUI/IV*. Jakarta.
- Ghofur, F. (2007). *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, I. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasan, M. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ja'far, K. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung.
- Jafar, K. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet.

- Ja'far, K. (2016). *Hukum Perdata Islam: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet.
- Karim, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, L. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Oni Sahrini, M. (2016). *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Pasaribu, C. (1996). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qusthoniah. (2014). Tas'ir Al-Jabari (Penatan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan mempertimbangkan Realitas Ekonomi. *Jurnal Syariah* , II, 82.
- Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saebani, B. A. (2009). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sahari, S. (2011). *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Sopiah, E. M. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V. ANDI OFFSET.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susiadi. (2014). *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Permatanet.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tjiptrosudibyo, R. S. (2006). *KItab Undang-Undang Hukum Perdata* . Jakarta: Paramadya.
- Umam, K. (2017). *Setiawan Umam dan Setiawan Budi Utomo*. Jakarta: Rajawali Pers.
- W.Alhafidz, A. (2013). *Kamus Fiqh*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wadji, S. K. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wilya, E. (2013). Ketentuan Hukum Islam Tentang At-TAs'ir Al-Jabari. *Jurnal Ilmiah AL-Syir'a* , 11, 7.
- WJS.Poerwadarminto. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Balai Pustaka.
- Ya'qub, H. (1992). *Kode Etik Dagang Dalam Islam*. Bandung: CV.Diponegoro.
- Yubsir, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Al Adalah*, Vol. 9 No.2 2013, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2013), h 242. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/php/adalah/article/view/265>. (27 Maret 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Zuhaily, M. (2010). *Fiqh Empat Mazhab Jilid IV*. Jakarta: Gema Insani.
- Zuhri, M. (2011). *Hadis Nabi Telaah Historis&Metodologis*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.